



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 236 TAHUN 2024

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA PENGAWASAN, DAN PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, Gubernur dibantu oleh Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah serta Gubernur menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
6. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72083);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA PENGAWASAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2024.

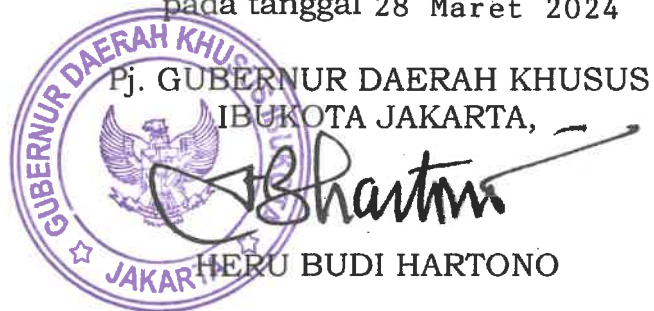
KESATU : Menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah acuan, sasaran dan prioritas pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilakukan oleh Inspektorat.

KETIGA : Semesta Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah tujuan, sasaran strategis dan program milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan klien pengawasan yang berpotensi untuk dilakukan pengawasan.

- KEEMPAT : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Audit Plan*) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024



Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 236 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA
PENGAWASAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2024

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT TAHUN 2024

A. TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah:

1. meningkatkan kualitas peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern guna memberikan nilai tambah organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan;
2. menyinergikan peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. meningkatkan pemberian asurans (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
4. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

B. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Arah kebijakan pengawasan intern adalah pelaksanaan kegiatan asurans (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin (*systematic and disciplined approach*) untuk menilai dan meningkatkan efektivitas proses-proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian (*control*), meliputi:

1. pembangunan dan penguatan tata kelola, manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berkelanjutan (*sustainable*) melalui pengembangan dan penerapan model Tiga Lini (*Three Lines Models*);

2. pelaksanaan asurans (*assurance*) yang fokus pada program dan kegiatan prioritas yang memiliki risiko tinggi;
3. pemberian konsultansi (*consulting*) yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan evaluasi proses pengendalian dalam rangka meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian;
4. pelaksanaan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan organisasi, keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional, efektivitas dan efisiensi operasi dan program, pengamanan asset, dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur dan kontrak; dan
5. peningkatan kapabilitas APIP dengan pendekatan *Internal Audit Capability Model* (IACM).

C. PRINSIP PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pelaksanaan pengawasan intern dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Kecakapan dan kecermatan profesional;
APIP harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pimpinan APIP harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan pengawasan intern secara kolektif memiliki kecakapan (gabungan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi) yang diperlukan dalam penugasan. APIP juga harus menerapkan kecermatan profesional dalam menggunakan teknik pembinaan dan pengawasan dengan memperhatikan risiko signifikan klien pengawasannya.
2. Independen;
APIP harus bebas dari adanya pembatasan terhadap ruang lingkup, akses pencatatan, personel, prasarana dan sarana, sumber daya, dan pendanaan kepada APIP wajib diungkapkan kepada Gubernur dan mendiskusikan implikasinya.
3. Objektif;
APIP harus memiliki sikap netral dan tidak bias serta menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan yang mengakibatkan rusaknya kepercayaan kepada APIP itu sendiri. APIP wajib melakukan penolakan terhadap penugasan yang dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan.

4. Tidak tumpang tindih antar APIP maupun Pemeriksa Eksternal; dan APIP harus memastikan bahwa penugasan yang akan dilaksanakan tidak adanya tumpang tindih dengan penugasan yang dilaksanakan oleh APIP lain (Inspektorat Jenderal/Inspektorat pada Kementerian/Lembaga maupun Pemeriksa Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan).
5. Berorientasi pada pemberian nilai tambah terhadap tujuan organisasi. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP harus mampu memberikan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern bagi organisasi dan pemangku kepentingan dengan menjadi mitra strategis (*strategic partner*) pemangku kepentingan dan penasihat terpercaya (*trusted advisor*). APIP harus melakukan respon terhadap perubahan proses bisnis, risiko, program, sistem, dan pengendalian organisasi yang terjadi klien pengawasan melalui penugasan pembinaan dan pengawasan.

D. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Ruang lingkup pengawasan intern Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup audit, reviu, monitoring dan evaluasi, peran konsultansi dan kegiatan pengawasan lainnya atas:

1. efektivitas, efisiensi dan/atau keekonomisan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah termasuk pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. pengelolaan sumber daya daerah;
3. pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD;
6. pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara;
7. penanganan pengaduan dan pelimpahan dari Aparat Penegak Hukum;
8. implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah;

9. peningkatan kapabilitas APIP;
10. penyelenggaraan SPIP; dan
11. penyelenggaraan reformasi birokrasi.

E. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintah provinsi bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat mencapai tujuannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas proses-proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian (*control*), dengan fokus meliputi:

1. Kegiatan Audit

- a. audit kinerja sasaran strategis/program/kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD Tahun 2023 dan tahun sebelumnya dengan sasaran/program/kegiatan yang strategis dan memiliki risiko tinggi;
- b. audit dengan tujuan tertentu pada Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki risiko tinggi;
- c. probity audit atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- d. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara/daerah;
- e. pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif selaku perangkat Gubernur;
- f. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara/daerah yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH); dan
- g. pemeriksaan atas penagihan penerimaan pajak dan/atau bukan pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah.

2. Kegiatan Reviu

- a. dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan;
- b. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. implementasi manajemen risiko Perangkat Daerah;
- f. pengelolaan Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Umum Fisik Perangkat Daerah;
- g. reviu utang daerah atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan pada Perangkat Daerah; dan
- h. reviu Harga Perkiraan Sendiri, Standar Satuan Harga, dan Standar Satuan Biaya.

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

- a. monitoring dan/atau evaluasi penanganan penanggulangan kemiskinan dan stunting pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- b. monitoring dan evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- c. monitoring pengadaan barang/jasa;
- d. penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- f. monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik;
- g. monitoring pelaksanaan pengadaan PPPK;
- h. penyerapan anggaran/pemeriksaan kas;
- i. monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APIP;
- j. perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender; dan
- k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH), Survei Penilaian Integritas, dan *Monitoring Center for Prevention* (MCP).

4. Kegiatan Pengawasan Lainnya

- a. pemeriksaan akhir jabatan;
- b. pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- c. pengendalian gratifikasi;
- d. efektivitas pengendalian korupsi;
- e. pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;

- f. verifikasi atas ketaatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
- g. pengembangan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- h. pengembangan dan penerapan Model Tiga Lini (*Three Lines Models*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- i. pelaporan pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2023 dan pendampingan pelaksanaan Tutup Buku Tahun Anggaran 2024; dan
- j. pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

5. Kegiatan Konsultasi

- a. sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. sosialisasi dan asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Perangkat Daerah;
- c. pendampingan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. penilaian mandiri kapabilitas APIP;
- e. fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK; dan
- f. pelaksanaan konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan.

6. Kegiatan Dukungan Pengawasan

- a. melakukan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia);
- b. pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
- c. sertifikasi dan implementasi ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- d. pembangunan/pengembangan sistem informasi pengawasan;
- e. peningkatan kapabilitas APIP;
- f. pendidikan dan pelatihan; dan
- g. pelatihan kantor sendiri.

F. PELAPORAN HASIL PENGAWASAN INTERN

Hasil pengawasan intern dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Gubernur dan pimpinan klien pengawasan. Laporan hasil pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

Klien pengawasan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern. Tindak lanjut untuk hasil pengawasan intern yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut untuk hasil pengawasan intern yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pengawasan intern diterima.

H. PENANGANAN PEMBATAHAN RUANG LINGKUP, SUMBER DAYA, PELAKSANAAN DAN KOMUNIKASI HASIL AUDIT

Gubernur dan Klien pengawasan tidak membatasi ruang lingkup audit, pelaksanaan audit dan komunikasi hasil audit yang dilaksanakan oleh APIP. Penetapan ruang lingkup audit, pelaksanaan audit dan komunikasi hasil audit mengedepankan komunikasi yang sinergis antara APIP dengan Klien pengawasan. Apabila terdapat pembatasan sumber daya dan/atau keuangan, pimpinan APIP mengomunikasikan kepada Gubernur dan *stakeholders* terkait untuk mendapat penyelesaian dan perbaikan.

Apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit, pelaksanaan audit dan komunikasi hasil audit yang dilaksanakan oleh Klien Pengawasan, pimpinan APIP segera menyampaikan laporan kepada Gubernur dan mendiskusikan implikasinya.



PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 236 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA
PENGAWASAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2024

SEMESTA PENGAWASAN INSPEKTORAT TAHUN 2024

A. DAFTAR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI
JAKARTA

NO	DAFTAR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	
1.	Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	
	A.	Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
		1) Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum
		2) Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah
		3) Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarannya
		4) Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan
		5) Melakukan evaluasi tata ruang untuk mendukung penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan masyarakat dan tertib pertanahan
		6) Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau
		7) Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan
	B.	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon
		1) Membangun orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas seluruh pemangku kepentingan penyelenggara bangunan gedung
		2) Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan
		3) Menurunkan beban pencemaran lingkungan
		4) Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau
		5) Pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terintegrasi
		6) Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha
		7) Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		8) Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat

NO	DAFTAR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	
	9)	Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap
	10)	Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
	11)	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	12)	Melakukan pembangunan/penataan/penghijauan hutan untuk meningkatkan kualitas hutan kota
	13)	Melaksanakan inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	14)	Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) dinas sesuai dengan perkembangan teknologi
	15)	Melakukan inventarisasi dan koordinasi terkait standardisasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi DKI Jakarta
	16)	Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan
	17)	Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota
	C.	Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota
	1)	Pengurangan dampak banjir melalui peningkatan tampungan, penataan kali/sungai serta pembangunan tanggul pantai
	2)	Pengurangan genangan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan saluran drainase
	3)	Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah secara yustisial dan non yustisial dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta memberdayakan potensi masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	4)	Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam melalui kolaborasi seluruh <i>stakeholder</i>
	5)	Mengoptimalkan perangkat kebijakan di bidang penanganan kebakaran dan penyelamatan serta berkolaborasi dengan instansi dan pemangku kepentingan
	6)	Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air tanah dalam upaya pengendalian penurunan muka tanah
	D.	Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit
	1)	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Bina Marga
	2)	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan mendorong terwujudnya sistem pusat pelayanan yang berorientasi transit
	3)	Meningkatkan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dan mengurangi kemacetan

NO			DAFTAR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
		4)	Meningkatkan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan
		5)	Merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian
2.	Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		
	A.	Penguatan Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi	
		1)	Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang selaras dengan peraturan yang terus berkembang dan perlu dipedomani, diantaranya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tentunya membutuhkan telaah kebijakan terbaru dalam urusan penanaman modal terutama terkait dengan kebijakan kemudahan berusaha di daerah. Selain harmonisasi produk hukum dalam rangka meningkatkan iklim investasi juga dilakukan penyusunan serta pengembangan peta potensi dan peluang investasi di DKI Jakarta
		2)	Pelaksanaan kegiatan promosi dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, perwakilan negara asing, calon investor, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta nasional, swasta asing dan <i>stakeholder</i> lainnya terkait penanaman modal. Bentuk kegiatan promosi dapat dilakukan melalui pelaksanaan promosi secara langsung maupun tidak langsung (<i>daring</i>) atau media promosi lainnya. Lokus pelaksanaan di dalam negeri dan luar negeri. Pelaksanaan fasilitasi calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di Jakarta khususnya pada proyek pemerintah DKI Jakarta dan atau proyek BUMD. Dalam persiapan pelaksanaan promosi dilakukan kurasi atas standardisasi pengajuan dan melakukan evaluasi terhadap proyek dari BUMD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dipresentasikan pada forum promosi, pelaksanaan riset pasar/investor <i>mapping behaviour</i> (pemetaan perilaku/karakteristik negara-negara investor agar proyek yang akan ditawarkan tepat sasaran). Selain itu ditingkatkan peran komite investasi dalam mendukung pencapaian target penanaman modal
		3)	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal, peningkatan pemahaman bagi para pelaku usaha mengenai urusan penanaman modal yang dilakukan melalui antara lain bimbingan teknis, sosialisasi maupun diseminasi. Pelaksanaan pengendalian juga dilaksanakan melalui kegiatan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal

NO	DAFTAR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	
	4)	a. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; b. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; c. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan d. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
	5)	a. Memetakan keberadaan cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan cagar budaya secara holistik; b. Memperkuat kerja sama dengan organisasi di daerah, dan juga pemerintah daerah untuk pengelolaan cagar budaya secara mandiri sesuai dengan standar konservasi; dan c. Memanfaatkan cagar budaya untuk penguatan nilai-nilai budaya daerah dan juga nilai-nilai ekonomi cagar budaya, salah satunya sebagai objek wisata, tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya.
	6)	a. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu melalui peningkatan kajian untuk keakuratan informasi koleksi; pengembangan promosi melalui media cetak, elektronik virtual; kerja sama dengan komunitas museum untuk membuat program publik yang menarik; b. Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas SDM permuseuman melalui peningkatan SDM dengan pelatihan dan sertifikasi keahlian teknis permuseuman; c. Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum melalui peningkatan pelayanan berdasarkan survei kepuasan pengunjung; peningkatan peran insan museum dalam pengelolaan koleksi; d. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum melalui penyempurnaan fasilitas untuk pengelolaan koleksi; dan e. Revitalisasi sarana dan prasarana museum melalui peningkatan sarana edukasi dan rekreasi; pengembangan sistem pencatatan, penyimpanan dan pengamanan koleksi; pengembangan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
	7)	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya literasi
	8)	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya literasi
	9)	Melakukan pendataan, pengolahan, preservasi, pengalihmediaan, dan/atau akuisisi naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan

NO	DAFTAR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	
	10)	Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) yang dilakukan melalui pelaksanaan fasilitasi rencana proyek dengan skema KPDBU yang masuk ke dalam simpul KPDBU dengan ruang lingkup fasilitasi sesuai peraturan gubernur yang mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	11)	a. Membangun tata kelola inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi; dan b. Mengoptimalkan penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui kolaborasi <i>pentahelix</i> antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.
	B.	Pengurangan Ketimpangan melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial 1) Peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemutakhiran <i>database</i> , pembinaan dan penilaian, bimbingan teknis dan pelatihan, pemberian penghargaan, dana stimulasi, penyempurnaan kebijakan terkait, monitoring evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan sosial serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak 2) Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan dasar PPKS baik di dalam ataupun luar panti, penyempurnaan kebijakan terkait serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial 3) Pemberian layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran kepada PPKS melalui peningkatan kualitas layanan data terpadu kesejahteraan sosial dengan pemutakhiran berkala untuk mewujudkan layanan data yang lengkap dan akurat, penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan, peningkatan kolaborasi non-pemerintah dalam pemberian bantuan sosial ataupun bantuan pengembangan ekonomi serta penyempurnaan kebijakan terkait 4) Penanganan bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal bagi korban bencana alam dan sosial, peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya yang responsif dan adaptif terhadap bencana, penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan serta penyempurnaan kebijakan terkait 5) Penanganan bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal bagi PPKS 6) Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/pemasaran 7) Peningkatan jumlah kecamatan yang tahan pangan 8) Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan, hasil pertanian, perikanan dan peternakan

NO	DAFTAR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	
	9)	Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Teknologi dan masyarakat lainnya) dalam pengembangan kewirausahaan terpadu (Jakpreneur) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	10)	Peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemutakhiran <i>database</i> , pembinaan dan penilaian, bimbingan teknis dan pelatihan, pemberian penghargaan, dana stimulasi, penyempurnaan kebijakan terkait, monitoring evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan sosial serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak
C. Peningkatan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja		
	1)	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
	2)	Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
	3)	Meningkatkan SDM pengelola dan pengawas koperasi melalui sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan
	4)	a. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan b. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM.
	5)	a. Pembinaan pelaku usaha kecil; dan b. Pendidikan dan pelatihan UMKM.
	6)	Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan, pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
	7)	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
	8)	Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
	9)	Meningkatkan SDM pengelola dan pengawas koperasi melalui sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan
D. Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah		
	1)	Peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata DKI Jakarta
	2)	Peningkatan pemasaran dan informasi pariwisata secara sinergis, intensif, inovatif, dan interaktif
	3)	Peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif
	4)	Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
	5)	Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/ <i>urban farming</i>
	6)	Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging, olahan hasil pertanian peternakan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/ <i>urban farming</i>

NO	DAFTAR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	
		7) Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging, olahan pertanian peternakan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/<i>urban farming</i> 8) Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging, olahan pertanian dan peternakan, pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/<i>urban farming</i> 9) Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging, olahan hasil pertanian dan peternakan, pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/<i>urban farming</i> 10) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui <i>Online Single Submission Risk Based Approached</i> (OSS-RBA) 11) Melakukan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga 12) Peningkatan ekspor dan pengendalian impor 13) Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga 14) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 15) Meningkatkan produktivitas industri dan mendorong Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial 16) Peningkatan pembinaan dan pengawasan IKM
3.	Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	
	A.	Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat 1) Peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan anggaran serta pengelolaan manajemen dan administrasi pemerintahan 2) Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang, peningkatan dan pemerataan kualitas belajar mengajar, peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan vokasi berbasis kerja sama dunia usaha dan industri, dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang didukung dengan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel B. Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat 1) Peningkatan kualitas layanan kepada anggota dewan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2) Peningkatan pemahaman masyarakat melalui penguatan ideologi pancasila 3) Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi melalui penguatan pendidikan politik dan peningkatan citra positif lembaga dan institusi politik 4) Peningkatan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) melalui penguatan wawasan kemandirian ORMAS dan pembinaan konsep kelembagaan mandiri

NO	DAFTAR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	
		5) Peningkatan pemahaman masyarakat melalui pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama 6) Peningkatan kualitas layanan kepada anggota dewan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 7) Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di masyarakat 8) Peningkatan pengelolaan kantor dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai serta peningkatan pelayanan sekretariat DPRD
C.	Peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	
		1) Implementasi transformasi pelayanan kesehatan yang adaptif dan terintegrasi dengan memfokuskan pada standardisasi fasilitas kesehatan, transformasi organisasi, inovasi layanan, peningkatan kapasitas kegawatdaruratan klinis dan komunitas, digitalisasi dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dalam kerangka <i>urban health</i> 2) Membangun kepercayaan dan pengalaman terbaik bagi penerima layanan melalui pemenuhan dan pengembangan kompetensi SDM kesehatan dan optimalisasi implementasi <i>hospitality</i> 3) Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan keamanan makanan dan minuman 4) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk; penguatan kerja sama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal, non formal dan informal; peningkatan cakupan pendataan keluarga terpadu satu pintu melalui Carik Jakarta; peningkatan pengolahan dan analisis data Carik Jakarta dalam penanganan isu kependudukan; peningkatan dukungan sarana dan prasarana pendataan keluarga terpadu satu pintu melalui Carik Jakarta 5) Penguatan pemahaman 8 (delapan) fungsi keluarga; optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak; peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja; penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia; peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor Keluarga Berencana (KB) lestari, keluarga peserta Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW), serta peserta KB mandiri di wilayah kampung KB; peningkatan kemitraan pembangunan keluarga 6) Meningkatkan peran serta pemuda melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda serta optimalisasi dalam pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan DKI Jakarta

NO	DAFTAR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	
	7)	Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan
	8)	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan serta peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga
	9)	Peningkatan daya saing olahraga
	10)	Membentuk anggota pramuka yang berjiwa patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup melalui peningkatan SDM dan pengembangan organisasi kepramukaan.
	11)	Peningkatan dan pengembangan kapasitas anggota kepramukaan
	12)	Penguatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan keterlibatan aktif masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kader kesehatan, advokasi dan aksi lintas sektoral
	13)	Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pelayanan KB yang berkualitas dan memadai; peningkatan keterlibatan/dukungan lembaga dan <i>stakeholder</i> dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi dan pelayanan KB; advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan peningkatan peran serta mitra kerja dan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB; promosi dan KIE program KKBPK melalui berbagai media; peningkatan kompetensi serta pendayagunaan tenaga penyuluh KB, tenaga pelayanan dan kader KB; konvergensi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan di kampung KB
	14)	a. Meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kantor melalui penyediaan anggaran, pemenuhan SDM dan sarana prasarana kebutuhan kantor; b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan anggaran; dan c. Meningkatkan tata kelola dukungan manajemen dan administrasi pemerintahan.
D. Penurunan Kesenjangan melalui Pembangunan Responsif Gender		
	1)	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang mencakup percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di perangkat daerah melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu, baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; dan pengembangan inovasi dalam upaya pelaksanaan PUG dan pemberdayaan Perempuan

NO	DAFTAR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA		
		2)	Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang mencakup peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan TPPO; penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan; koordinasi antar unit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah daerah, komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO
		3)	Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak melalui advokasi dan pelayanan pada keluarga yang komprehensif dan terintegrasi pada lembaga/organisasi/kelompok/perorangan yang berperan mendampingi keluarga di DKI Jakarta
		4)	Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu
		5)	Meningkatkan advokasi dan koordinasi tentang Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga/organisasi/kelompok/stakeholder baik yang memberikan pelayanan langsung pada anak dan keluarga maupun yang berkaitan dengan anak; dan meningkatkan pemenuhan hak partisipasi anak untuk pembangunan melalui pendampingan forum anak daerah
		6)	Meningkatkan advokasi dan koordinasi tentang perlindungan bagi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) pada lembaga/organisasi/kelompok/stakeholder baik yang memberikan pelayanan perlindungan langsung pada keluarga dan AMPK; dan meningkatkan akses dan informasi layanan korban kekerasan terhadap anak yang terintegrasi dan komprehensif di DKI Jakarta
4.	Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
	A.	Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas	
		1)	Mempercepat peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik
		2)	Mempercepat peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi
		3)	Mempercepat peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di daerah
		4)	Mempercepat peningkatan manajemen keamanan informasi
		5)	Mempercepat peningkatan kualitas program penunjang urusan pemerintahan daerah

NO	DAFTAR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	
	B.	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
	1)	Melalui penguatan tata kelola dan kapasitas keuangan perusahaan, penciptaan SDM unggul dan kompetitif, kemampuan bersaing di lingkup nasional dan global, serta memberikan kontribusi terhadap APBD untuk penciptaan lingkungan kota yang layak, produktif dan berkelanjutan
	2)	Pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa, perbaikan standar pelayanan dan peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan untuk mendorong perbaikan layanan pengadaan barang dan jasa
	3)	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
	4)	Menyelenggarakan penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah
	5)	Melaksanakan penatausahaan aset daerah yang akuntabel dan transparan melalui optimalisasi pemanfaatan aset, pemaksimalan penagihan piutang, pengelolaan barang milik daerah yang tertib, pengamanan barang milik daerah serta inventarisasi aset yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	6)	Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi
	C.	Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur
	1)	Mewujudkan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik melalui: pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN, pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan ASN, penataan ASN, promosi jabatan secara terbuka, penegakan disiplin aparatur serta pengembangan jabatan fungsional tertentu
	2)	Peningkatan pengembangan SDM
	D.	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
	1)	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk
	2)	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil
	3)	Ini adalah strategi untuk program pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada sasaran peningkatan tertib kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	4)	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan
	5)	Dilakukan melalui reviu dan harmonisasi regulasi; penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur tindak lanjut terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Kebijakan OSS. Untuk menjaga kualitas layanan maka disusun dan dilaksanakan sistem manajemen mutu serta pelaksanaan monitoring unit layanan. Dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan dilaksanakan pengadaan jasa/sarana prasarana pendukung teknis perizinan, fasilitasi sekaligus

NO		DAFTAR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	
			penyelesaian pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan serta dilakukan pendampingan fasilitasi hukum yang membutuhkan. Perkembangan kebijakan perizinan juga perlu diimbangi dengan penyebarluasan informasi secara luas sehingga masyarakat dapat mengakses perubahan kebijakan perizinan dengan mudah. Pengembangan SDM juga menjadi isu utama sehingga diambil kebijakan SDM terkait: penyusunan standardisasi kompetensi SDM, peningkatan kualitas SDM serta rekrutmen Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) berbasis kebutuhan dan kinerja
	6)		Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan pengembangan layanan berbasis digital melalui pengembangan sistem teknologi informasi, penyiapan sarana jaringan dan infrastruktur secara <i>online</i> dan <i>penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi</i>
	7)		Pelayanan dan pemanfaatan arsip autentik, pengelolaan data dan informasi kearsipan serta penguatan strategi dan sistem <i>pelayanan</i>
	8)		Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
	9)		Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PPSU, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), RT, RW, LMK dan FKDM
	10)		Pengelolaan kota administrasi dan pelaksanaan koordinasi wilayah yang <i>optimal</i>
	11)		Pengelolaan kabupaten administrasi dan pelaksanaan koordinasi wilayah yang <i>optimal</i>
	12)		Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pengembangan di wilayah yang <i>optimal</i>
	13)		Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PKK, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dan RPTRA
	14)		Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PKK, Posyandu, Jumantik, dan ruang interaksi warga
	15)		Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan ketertiban umum
	E.	Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	
		1)	Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		2)	Persentase fasilitasi kerja sama daerah yang dilakukan baik fasilitasi sinergi dengan pemerintah pusat, kerja sama antar pemerintah daerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri dan persentase penyelesaian masalah (setiap isu kecil yang berkembang dari sebuah isu

NO	DAFTAR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA		
			besar yang tersaji-apa adanya dari sumber/lapangan) pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah
		3)	Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum Provinsi DKI Jakarta
		4)	Persentase kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		5)	Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		6)	a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis bukti; b. Mengedepankan integrasi dalam penyusunan rencana pembangunan; dan c. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan secara efektif dan efisien melalui penguatan pengendalian proses pembangunan.
		7)	a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis bukti; b. Mengedepankan sinergi dalam penyusunan rencana pembangunan; dan c. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan secara efektif dan efisien melalui penguatan pengendalian proses pembangunan.
		8)	Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)
		9)	Peningkatan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam mewujudkan kapabilitas APIP level 4
		10)	Fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan kolaborasi dan kerja sama daerah

B. DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
1.	Sekretariat Daerah		
	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		
		1)	Peningkatan kualitas layanan pimpinan dan pengadministrasian sekretariat daerah
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
		2)	Perbaiki proses bisnis dan tata kelola organisasi perangkat daerah yang dinamis
			Program penataan organisasi
		3)	Penataan, penyusunan, dan harmonisasi produk hukum daerah
			Program fasilitasi dan koordinasi hukum
		4)	Percepatan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan
			a. Program pemerintahan dan otonomi daerah

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			b. Program kesejahteraan rakyat
			c. Program perekonomian dan pembangunan
			d. Program kebijakan administrasi pembangunan
		5)	Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan kolaborasi dan kerja sama daerah
			Program penataan organisasi
2.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta		
			a. Program pemerintahan dan otonomi daerah
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
3.	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta		
			a. Program fasilitasi dan koordinasi hukum
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
4.	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta		
			a. Program penataan organisasi
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
5.	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta		
			a. Program kesejahteraan rakyat
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
6.	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta		
			a. Program kesejahteraan rakyat
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
7.	Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
8.	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
9.	Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta		
			a. Program penataan organisasi
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
10.	Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta		
			a. Program perekonomian dan pembangunan
			b. Program kebijakan administrasi pembangunan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
11.	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta		
			a. Program kebijakan administrasi pembangunan
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
12.	Sekretariat DPRD		
	Penguatan Kapasitas Legislatif dalam Meneruskan Aspirasi Masyarakat		
			Peningkatan efektivitas layanan dan fasilitasi lembaga legislatif
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			b. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
13.	Inspektorat		
	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		
			Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan pengawasan
			c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
14.	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan pengawasan
			c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
15.	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan pengawasan
			c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
16.	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan pengawasan
			c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
17.	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan pengawasan
			c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
18.	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan pengawasan
			c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
19.	Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan pengawasan
			c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
20.	Dinas Pendidikan		
	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas serta Relevansi Hasil Pembelajaran		
			Terjaminnya akses dan layanan serta perbaikan tata kelola pendidikan

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
21.	Suku Dinas	Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
22.	Suku Dinas	Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
23.	Suku Dinas	Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
24.	Suku Dinas	Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
25.	Suku Dinas	Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
26.	Suku Dinas	Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
27.	Suku Dinas	Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
28.	Suku Dinas	Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
29.	Suku Dinas	Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
30.	Suku Dinas	Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
31.	Suku Dinas	Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
32.	Pusat Pelayanan	Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
33.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pendidikan	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			b. Program pengelolaan Pendidikan
34.	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
35.	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
36.	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
37.	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
38.	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
39.	Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendidikan
40.	Dinas Kesehatan		
		Meningkatnya Akses Universal Terhadap Layanan Kesehatan yang Holistik, Berkualitas, dan Berkelanjutan	
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan (<i>Continuum of Care</i>)	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
			d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
			e. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
41.	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
			d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
			e. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM				
42.	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara				
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan		
			d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman		
			e. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		
43.	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat				
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan		
			d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman		
			e. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		
44.	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan				
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan		
			d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman		
			e. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		
45.	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur				
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan		
			d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman		
			e. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		
46.	Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu				
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan		
			d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman		
			e. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		
47.	Laboratorium Kesehatan Daerah				
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			b. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
48.	Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah		
			a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
			b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
49.	Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah		
			a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
			b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
50.	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan Daerah		
			a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
			b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
51.	Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta		
			a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
			b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
52.	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
53.	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
54.	Rumah Sakit Umum Daerah Koja		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
55.	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
56.	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
57.	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
58.	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
59.	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
60.	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
61.	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
62.	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
63.	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
64.	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
65.	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
66.	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
67.	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
68.	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
69.	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
70.	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
71.	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
72.	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
73.	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
74.	Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
75.	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
76.	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
77.	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
78.	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
79.	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
80.	Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
81.	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
82.	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
83.	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
84.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanah Abang		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
85.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
86.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
87.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
88.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
89.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
90.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
91.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
92.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
93.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
94.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
95.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
96.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
97.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
98.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
99.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
100.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
101.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
102.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
103.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Palmerah		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
104.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
105.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
106.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
107.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan
108.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
109.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
110.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
111.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
112.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
113.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
114.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
115.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
116.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
117.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
118.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
119.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
120.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
121.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
122.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
123.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan
124.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan
125.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
126.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
127.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
128.	Dinas Bina Marga		
	Penyediaan Jalan dengan Infrastruktur Pendukung untuk Mobilitas yang Optimal		
		Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Bina Marga	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan jalan
			c. Program pengembangan jasa konstruksi
129.	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan jalan
130.	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan jalan
131.	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan jalan
132.	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan jalan
133.	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan jalan
134.	Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan jalan
			c. Program pengembangan jasa Konstruksi
135.	Unit Pengadaan Tanah Bina Marga		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan jalan
			c. Program pengembangan jasa Konstruksi
136.	Pusat Data dan Informasi Bina Marga		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan jalan
			c. Program pengembangan jasa konstruksi
137.	Dinas Sumber Daya Air		
	A.	Peningkatan Terhadap Akses Layanan Dasar	
		Peningkatan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan	
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		Peningkatan akses pengolahan air limbah yang layak, aman, dan berkelanjutan	
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
	B.	Pemulihan Daerah Aliran Sungai dan Pengamanan Pesisir serta Peningkatan Upaya Retensi dan Daur Ulang Air	
		Peningkatan pengendalian daya rusak air Yang berkelanjutan	
		a.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
		b.	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		c.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
	C.	Konservasi Air Tanah dan Mitigasi Penurunan Muka Tanah	
		Pengendalian penurunan muka tanah melalui Pemanfaatan air tanah yang terkendali	
		Program pengelolaan aspek kegeologian	
138.	Suku Dinas	Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat	
		a.	Program pengelolaan SDA
		b.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
		c.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
139.	Suku Dinas	Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara	
		a.	Program pengelolaan SDA
		b.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
		c.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		d.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		e.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
140.	Suku Dinas	Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat	
		a.	Program pengelolaan SDA
		b.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
		c.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
141.	Suku Dinas	Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan	
		a.	Program pengelolaan SDA
		b.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
		c.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
142.	Suku Dinas	Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	
		a.	Program pengelolaan SDA
		b.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
		c.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
143.	Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program pengelolaan SDA
			b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
			c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
			d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
			e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
144.	Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan SDA
			c. Program pengelolaan aspek kegeologian
145.	Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
146.	Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air		
			Program pengelolaan SDA
147.	Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan SDA
148.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		
	A.	Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	
		Peningkatan kualitas rencana dan perwujudan tertib tata ruang sistem pusat pelayanan berorientasi transit	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan penataan ruang
	B.	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	
		Pemenuhan bangunan gedung yang memenuhi kaidah bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas	
		Program penataan bangunan gedung	
	C.	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	
		Penyelesaian administrasi pertanahan untuk kampung kota	
		Program penatagunaan tanah	
149.	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program penataan bangunan gedung
			b. Program penyelenggaraan penataan ruang
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
150.	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program penataan bangunan gedung
			b. Program penyelenggaraan penataan ruang

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
151.	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program penataan bangunan gedung
			b. Program penyelenggaraan penataan ruang
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
152.	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program penataan bangunan gedung
			b. Program penyelenggaraan penataan ruang
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
153.	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program penataan bangunan gedung
			b. Program penyelenggaraan penataan ruang
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
154.	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program penataan bangunan gedung
			b. Program penyelenggaraan penataan ruang
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
155.	Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan		
			a. Program penyelenggaraan penataan ruang
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
156.	Unit Pemetaan dan Pengukuran Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan		
			Program penyelenggaraan penataan ruang
157.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Penataan Permukiman dan Peningkatan Akses Hunian Layak bagi Seluruh Masyarakat		
			Penyediaan hunian layak dan penataan kawasan kumuh perkotaan
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengembangan perumahan
			c. Program kawasan permukiman
			d. Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
158.	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program peningkatan PSU
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
159.	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program peningkatan PSU
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
160.	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program peningkatan PSU
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
161.	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program peningkatan PSU
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
162.	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program peningkatan PSU
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
163.	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program peningkatan PSU
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
164.	Unit Pengelola Rumah Susun I		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
165.	Unit Pengelola Rumah Susun II		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
166.	Unit Pengelola Rumah Susun III		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
167.	Unit Pengelola Rumah Susun IV		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
168.	Unit Pengelola Rumah Susun V		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
169.	Unit Pengelola Rumah Susun VI		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
170.	Unit Pengelola Rumah Susun VII		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
171.	Unit Pengelola Rumah Susun VIII		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
172.	Unit Pengelola Dana Perumahan		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
173.	Pusat Data dan Informasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
174.	Satuan Polisi Pamong Praja		
		Penguatan Stabilitas Kota melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
		Peningkatan layanan ketenteraman dan ketertiban umum secara humanis dan harmonis	
		a.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
		b.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
175.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat		
		a.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
		b.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
176.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara		
		a.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
		b.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
177.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat		
		a.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
		b.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
178.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan		
		a.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
		b.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
179.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur		
		a.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
		b.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
180.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
		a.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
		b.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
181.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		
		Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
		Peningkatan kapasitas ketangguhan kebakaran	
		a.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
		b.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
182.	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
		a.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			b. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
183.	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
184.	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
185.	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
186.	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
187.	Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
188.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
189.	Dinas Sosial		
		Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	
		1)	Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
			Program pemberdayaan sosial
		2)	Membangun layanan kesejahteraan sosial yang terintegrasi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program rehabilitasi sosial
			c. Program perlindungan dan jaminan sosial
			d. Program penanganan bencana
190.	Suku Dinas	Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	
			a. Program pemberdayaan sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			c. Program rehabilitasi sosial
			d. Program perlindungan dan jaminan sosial
			e. Program penanganan bencana
191.	Suku Dinas	Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	
			a. Program pemberdayaan sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			c. Program rehabilitasi sosial
			d. Program perlindungan dan jaminan sosial
			e. Program penanganan bencana
192.	Suku Dinas	Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	
			a. Program pemberdayaan sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			c. Program rehabilitasi sosial
			d. Program perlindungan dan jaminan sosial
			e. Program penanganan bencana
193.	Suku Dinas	Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	
			a. Program pemberdayaan sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			c. Program rehabilitasi sosial
			d. Program perlindungan dan jaminan sosial
			e. Program penanganan bencana
194.	Suku Dinas	Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	
			a. Program pemberdayaan sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			c. Program rehabilitasi sosial
			d. Program perlindungan dan jaminan sosial
			e. Program penanganan bencana
195.	Panti Sosial	Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
196.	Panti Sosial	Asuhan Anak Putra Utama 1	
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
197.	Panti Sosial	Asuhan Anak Putra Utama 2	
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
198.	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
199.	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
200.	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
201.	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
202.	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
203.	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
204.	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
205.	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
206.	Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
207.	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
208.	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
209.	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
210.	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
211.	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1		
			a. Program rehabilitasi sosial

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
212.	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
213.	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
214.	Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
215.	Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
216.	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
217.	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2		
			a. Program rehabilitasi sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
218.	Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial		
			a. Program perlindungan dan jaminan sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
219.	Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta		
			a. Program pemberdayaan sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
220.	Sekretariat Pengelola Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari		
			a. Program pemberdayaan sosial
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
221.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi		
	A.	Meningkatnya Motivasi Masyarakat Usia Produktif dalam Kegiatan Perekonomian	
		Menguatkan daya saing angkatan kerja dengan adaptabilitas digital	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program perencanaan tenaga kerja
			c. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
			d. Program penempatan tenaga kerja
			e. Program hubungan industrial
			f. Program pengawasan ketenagakerjaan
	B.	Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan dengan Pemanfaatan Teknologi Energi serta Keterlibatan Peran serta Masyarakat	

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			Meningkatnya pemanfaatan daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit bersumber energi terbarukan
			a. Program pengelolaan energi terbarukan
			b. Program pengelolaan ketenagalistrikan
222.	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program penempatan tenaga kerja
			b. Program hubungan industrial
			c. Program pengawasan ketenagakerjaan
			d. Program pengelolaan energi terbarukan
			e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
223.	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program penempatan tenaga kerja
			b. Program hubungan industrial
			c. Program pengawasan ketenagakerjaan
			d. Program pengelolaan energi terbarukan
			e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
224.	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program penempatan tenaga kerja
			b. Program hubungan industrial
			c. Program pengawasan ketenagakerjaan
			d. Program pengelolaan energi terbarukan
			e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
225.	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program penempatan tenaga kerja
			b. Program hubungan industrial
			c. Program pengawasan ketenagakerjaan
			d. Program pengelolaan energi terbarukan
			e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
226.	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program penempatan tenaga kerja
			b. Program hubungan industrial
			c. Program pengawasan ketenagakerjaan
			d. Program pengelolaan energi terbarukan
			e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
227.	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
			b. Program pengelolaan ketenagalistrikan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
228.	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat		
			a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

NO				DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM
				b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
229.	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara			
				a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
230.	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat			
				a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
231.	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan			
				a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
232.	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur			
				a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
233.	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las			
				a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
234.	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri			
				a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
235.	Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
				a. Program pengawasan ketenagakerjaan
				b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
236.	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah			
				a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
237.	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk			
	A.	Menghilangkan Segala Bentuk Diskriminasi Berbasis Gender		
		1)	Pemuliaan, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	
			a. Program PUG dan pemberdayaan perempuan	
			b. Program peningkatan kualitas keluarga	
			c. Program pengelolaan sistem data gender dan anak	
		2)	Menurunkan kasus KtP dan TPPO	
			Program perlindungan perempuan	
	B.	Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Khusus Anak		
			a. Percepatan pencapaian kota layak anak	

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			b. Program PHA
	C.	Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Usaha Masyarakat menuju Kemandirian	
			a. Meningkatkan kualitas usaha masyarakat melalui pengembangan keberdayaan lembaga kemasyarakatan
			b. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
	D.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga	
			a. Peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan KB
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			c. Program pengendalian penduduk
			d. Program pembinaan KB
			e. Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	E.	Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Khusus Anak	
			a. Menurunkan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak
			b. Program perlindungan khusus anak
238.	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program PUG dan pemberdayaan perempuan
			b. Program perlindungan perempuan
			c. Program peningkatan kualitas keluarga
			d. Program PHA
			e. Program perlindungan khusus anak
			f. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
			g. Program pengendalian penduduk
			h. Program pembinaan KB
			i. Program pemberdayaan dan peningkatan KS
			j. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
239.	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program PUG dan pemberdayaan perempuan
			b. Program perlindungan perempuan
			c. Program peningkatan kualitas keluarga
			d. Program PHA
			e. Program perlindungan khusus anak
			f. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
			g. Program pengendalian penduduk
			h. Program pembinaan KB
			i. Program pemberdayaan dan peningkatan KS
			j. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
240.	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program PUG dan pemberdayaan perempuan

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			b. Program perlindungan perempuan c. Program peningkatan kualitas keluarga d. Program PHA e. Program perlindungan khusus anak f. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat g. Program pengendalian penduduk h. Program pembinaan KB i. Program pemberdayaan dan peningkatan KS j. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
241.	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program PUG dan pemberdayaan perempuan b. Program perlindungan perempuan c. Program peningkatan kualitas keluarga d. Program PHA e. Program perlindungan khusus anak f. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat g. Program pengendalian penduduk h. Program pembinaan KB i. Program pemberdayaan dan peningkatan KS j. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
242.	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program PUG dan pemberdayaan perempuan b. Program perlindungan perempuan c. Program peningkatan kualitas keluarga d. Program PHA e. Program perlindungan khusus anak f. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat g. Program pengendalian penduduk h. Program pembinaan KB i. Program pemberdayaan dan peningkatan KS j. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
243.	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program PUG dan pemberdayaan perempuan b. Program perlindungan perempuan c. Program peningkatan kualitas keluarga d. Program PHA e. Program perlindungan khusus anak f. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat g. Program pengendalian penduduk h. Program pembinaan KB i. Program pemberdayaan dan peningkatan KS j. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
244.	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak		
			a. Program perlindungan perempuan
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
245.	Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta KB		
			a. Program perlindungan perempuan
			b. Program PHA
			c. Program perlindungan khusus anak
			d. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
			e. Program pembinaan KB
			f. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
246.	Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak		
			a. Program Perlindungan Perempuan
			b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
247.	Pusat Data dan Informasi Keluarga		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
248.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian		
	A.	Mewujudkan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Melalui Pengelolaan yang Bertanggung Jawab	
		1)	Meningkatnya pelestarian sumber daya laut dan kawasan pesisir
			a. Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
			b. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		2)	Meningkatnya kualitas dan produksi perikanan yang berkelanjutan serta pencegahan penangkapan ikan berlebihan
			a. Program pengelolaan perikanan tangkap
			b. Program pengelolaan perikanan budidaya
			c. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	B.	Meningkatkan Budidaya dan Produksi Bahan Pangan di Kawasan Perkotaan	
			a. Terciptanya produktivitas sumber daya pertanian perkotaan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan perkembangan teknologi
			b. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			c. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
			d. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
			e. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			f. Program penyuluhan pertanian
	C.	Menguatkan Ketahanan, Keamanan, dan Jaminan Ketersediaan Pangan	
			a. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dengan gizi baik

NO DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM			
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi c. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat d. Program penanganan kerawanan pangan
249.	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat b. Program pengelolaan perikanan budidaya c. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan d. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian e. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner f. Program penyuluhan pertanian g. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
250.	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat b. Program pengelolaan perikanan budidaya c. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan d. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian e. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner f. Program penyuluhan pertanian g. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
251.	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat b. Program pengelolaan perikanan budidaya c. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan d. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian e. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner f. Program penyuluhan pertanian g. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
252.	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat b. Program pengelolaan perikanan budidaya c. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan d. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			e. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner f. Program penyuluhan pertanian g. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
253.	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat b. Program pengelolaan perikanan budidaya c. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan d. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian e. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner f. Program penyuluhan pertanian g. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
254.	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat b. Program pengelolaan perikanan budidaya c. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan d. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian e. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner f. Program penyuluhan pertanian g. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
255.	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan		
			a. Program pengelolaan perikanan budidaya b. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
256.	Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian		
			a. Program penanganan kerawanan pangan b. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
257.	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan		
			a. Program pengelolaan perikanan tangkap b. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
258.	Pusat Budidaya dan Konservasi Laut		
			a. Program pengelolaan perikanan budidaya b. Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
259.	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan		
			a. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
260.	Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman		
			a. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			b. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
261.	Dinas Lingkungan Hidup		
	A.	Pengelolaan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan	
			a. Optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah yang kolaboratif serta berwawasan lingkungan
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			c. Program pengelolaan persampahan
	B.	Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	
			a. Pengurangan pencemaran lingkungan melalui upaya preventif dan pengendalian yang intensif
			b. Program perencanaan lingkungan hidup
			c. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			d. Program pengendalian B3 dan limbah B3
			e. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan PPLH
			f. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
			g. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
262.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			b. Program pengendalian B3 dan limbah B3
			c. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan PPLH
			d. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
			e. Program pengelolaan persampahan
			f. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
263.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			b. Program pengendalian B3 dan limbah B3
			c. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan PPLH
			d. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
			e. Program pengelolaan persampahan
			f. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
264.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			b. Program pengendalian B3 dan limbah B3
			c. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan PPLH
			d. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
			e. Program pengelolaan persampahan
			f. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
265.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			b. Program pengendalian B3 dan limbah B3
			c. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan PPLH
			d. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
			e. Program pengelolaan persampahan
			f. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
266.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			b. Program pengendalian B3 dan limbah B3
			c. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan PPLH
			d. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
			e. Program pengelolaan persampahan
			f. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
267.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program pengendalian B3 dan limbah B3
			b. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan PPLH
			c. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
			d. Program pengelolaan persampahan
			e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
268.	Unit Pengelola Sampah Terpadu		
			a. Program pengelolaan persampahan
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
269.	Unit Penanganan Sampah Badan Air		
			a. Program pengelolaan persampahan
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
270.	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah		
			a. Program pengendalian B3 dan limbah B3

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
271.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Memberikan Pemenuhan atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan		
			a. Peningkatan tertib kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			c. Program pendaftaran penduduk
			d. Program pencatatan sipil
			e. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
			f. Program pengelolaan profil kependudukan
272.	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program pendaftaran penduduk
			b. Program pencatatan sipil
			c. Program pengelolaan profil kependudukan
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
273.	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program pendaftaran penduduk
			b. Program pencatatan sipil
			c. Program pengelolaan profil kependudukan
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
274.	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program pendaftaran penduduk
			b. Program pencatatan sipil
			c. Program pengelolaan profil kependudukan
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
275.	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program pendaftaran penduduk
			b. Program pencatatan sipil
			c. Program pengelolaan profil kependudukan
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
276.	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program pendaftaran penduduk
			b. Program pencatatan sipil
			c. Program pengelolaan profil kependudukan
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
277.	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program pendaftaran penduduk
			b. Program pencatatan sipil
			c. Program pengelolaan profil kependudukan

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
278.	Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan		
			a. Program pendaftaran penduduk
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
279.	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan		
			a. Program pencatatan sipil
			b. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
280.	Dinas Perhubungan		
	Terwujudnya Transportasi Terintegrasi dan Berkelanjutan		
			a. Meningkatkan layanan, infrastruktur, akses, dan integrasi transportasi
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			c. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			d. Program pengelolaan pelayaran
			e. Program pengelolaan perkeretaapian
281.	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
282.	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
283.	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
284.	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
285.	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
286.	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
287.	Unit Pengelola Angkutan Sekolah		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
288.	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
289.	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
290.	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
291.	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
292.	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
293.	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
294.	Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
295.	Unit Pengelola Perparkiran		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
296.	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
297.	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
298.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I		
			a. Program pengelolaan pelayaran
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
299.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II		
			a. Program pengelolaan pelayaran
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
300.	Unit Pengelola Terminal dan Angkutan Jalan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
301.	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
302.	Pusat Data dan Informasi Perhubungan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penyelenggaraan LLAJ
303.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik		
	A.	Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	
			a. Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			c. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	B.	Peningkatan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
			a. Peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi
			b. Program pengelolaan aplikasi informatika
	C.	Penyediaan Data, Informasi, dan Statistik yang Akurat untuk Analisis Kebijakan	
			a. Peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di daerah
			b. Program penyelenggaraan statistik sektoral
	D.	Peningkatan Keamanan Informasi	
			a. Peningkatan manajemen keamanan informasi
			b. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
304.	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
			b. Program pengelolaan aplikasi informatika
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
305.	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
			b. Program pengelolaan aplikasi informatika
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
306.	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
			b. Program pengelolaan aplikasi informatika
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
307.	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
			b. Program pengelolaan aplikasi informatika
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
308.	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
			b. Program pengelolaan aplikasi informatika
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
309.	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
			b. Program pengelolaan aplikasi informatika
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
310.	Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
			Program pengelolaan aplikasi informatika
311.	Unit Pengelola Perangkat dan Jaringan Sistem Elektronik		
			Program pengelolaan aplikasi informatika
312.	Unit Pengelola <i>Jakarta Smart City</i>		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan aplikasi informatika
313.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	A.	Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal untuk Mendukung Pembangunan Kota	
			a. Perbaikan iklim penanaman modal yang berdaya saing
			b. Program pengembangan iklim penanaman modal
			c. Program promosi penanaman modal
			d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
	B.	Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan	
			a. Pengembangan layanan berbasis digital dan aksesibilitas perizinan
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			c. Program pelayanan penanaman modal
			d. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
	C.	Terlaksananya Pengembangan Kemitraan Pembangunan Kota	
			a. Peningkatan fasilitasi kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha
			b. Program pemerintahan dan otonomi daerah
314.	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
315.	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
316.	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
317.	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
318.	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
319.	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program pelayanan penanaman modal
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
320.	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasyarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga		
	1)		Peningkatan partisipasi aktif serta pembinaan inisiatif dan kepemimpinan pemuda
			a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			b. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
	2)		Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui kesadaran berolahraga
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengembangan daya saing keolahragaan
321.	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			b. Program pengembangan daya saing keolahragaan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
322.	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			b. Program pengembangan daya saing keolahragaan
			c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
323.	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			b. Program pengembangan daya saing keolahragaan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
324.	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			b. Program pengembangan daya saing keolahragaan

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/BUMD, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM		
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
325.	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga	Kota Administrasi Jakarta Selatan	
			a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			b. Program pengembangan daya saing keolahragaan
			c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
326.	Unit Pengelola Gelanggang	Jakarta Pusat	
			a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			b. Program pengembangan daya saing keolahragaan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
327.	Unit Pengelola Gelanggang	Jakarta Utara	
			a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			b. Program pengembangan daya saing keolahragaan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
328.	Unit Pengelola Gelanggang	Jakarta Barat	
			a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			b. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
			c. Program pengembangan daya saing keolahragaan
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
329.	Unit Pengelola Gelanggang	Jakarta Timur	
			a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			b. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
			c. Program pengembangan daya saing keolahragaan
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
330.	Unit Pengelola Gelanggang	Jakarta Selatan	
			a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			b. Program pengembangan daya saing keolahragaan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
331.	Pusat Pelatihan Olahraga	Pelajar	
			a. Program pengembangan daya saing keolahragaan
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
332.	Dinas Kebudayaan	Pelestarian dan Pengembangan Potensi Warisan Budaya sebagai Investasi dalam Bidang Kebudayaan	
		1)	Terwujudnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

			b. Program pengembangan kebudayaan
			c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		2)	Memperkuat peran museum sebagai ktempat pelestarian dan pusat informasi benda cagar budaya dan koleksi
			Program pengelolaan permuseuman
333.	Suku Dinas	Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengembangan kebudayaan
334.	Suku Dinas	Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengembangan kebudayaan
335.	Suku Dinas	Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengembangan kebudayaan
336.	Suku Dinas	Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengembangan kebudayaan
337.	Suku Dinas	Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengembangan kebudayaan
338.	Suku Dinas	Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengembangan Kebudayaan
339.	Pusat Konservasi	Cagar Budaya	
			a. Program pengelolaan permuseuman
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
340.	Unit Pengelola	Museum Kebaharian Jakarta	
			a. Program pengelolaan permuseuman
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
341.	Unit Pengelola	Museum Seni	
			a. Program pengelolaan permuseuman
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
342.	Unit Pengelola	Museum Kesejarahan Jakarta	
			a. Program pengelolaan permuseuman
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
343.	Unit Pengelola	Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	
			a. Program pengelolaan permuseuman
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
344.	Unit Pengelola	Kawasan Perkampungan Budaya Betawi	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengembangan kebudayaan

345.	Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengembangan kebudayaan
346.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat		
			Meningkatnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat
			a. Program pembinaan perpustakaan
			b. Program pengelolaan arsip
			c. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
347.	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program pembinaan perpustakaan
			b. Program pengelolaan arsip
			c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
348.	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program pembinaan perpustakaan
			b. Program pengelolaan arsip
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
349.	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program pembinaan perpustakaan
			b. Program pengelolaan arsip
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
350.	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program pembinaan perpustakaan
			b. Program pengelolaan arsip
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
351.	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program pembinaan perpustakaan
			b. Program pengelolaan arsip
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
352.	Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra Hb Jassin		
			a. Program Pembinaan Perpustakaan
			b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
353.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru		
			Peningkatan jumlah wisatawan serta keterlibatan usaha ekonomi kreatif dalam memacu pertumbuhan ekonomi
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

			b. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata c. Program pemasaran pariwisata d. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual e. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
354.	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota – Jakarta Pusat		
			a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata b. Program pemasaran pariwisata c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
355.	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata b. Program pemasaran pariwisata c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
356.	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata b. Program pemasaran pariwisata c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
357.	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata b. Program pemasaran pariwisata c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
358.	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata b. Program pemasaran pariwisata c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

			d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
			e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
359.	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
			b. Program pemasaran pariwisata
			c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
360.	Unit Pengelola Kawasan Kota Tua		
			a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
			b. Program pemasaran pariwisata
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
361.	Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional		
			a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
			b. Program pemasaran pariwisata
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
362.	Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata		
			a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
			b. Program pemasaran pariwisata
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
363.	Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan		
			a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
			b. Program pemasaran pariwisata
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
364.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota		
	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas		
	1)	Peningkatan kualitas sebaran ruang terbuka hijau	
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati	
	2)	Peningkatan tutupan lahan melalui perluasan ruang terbuka hijau hutan kota	
		a. Peningkatan kualitas lahan dan hutan	
		b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	
		c. Program pengelolaan hutan	
		d. Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	
		e. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	
		f. Program pengelolaan daerah aliran sungai	
365.	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan keanekaragaman hayati

			b. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
366.	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan keanekaragaman hayati
			b. Program pengelolaan hutan
			c. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
367.	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan keanekaragaman hayati
			b. Program pengelolaan hutan
			c. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
368.	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan keanekaragaman hayati
			b. Program pengelolaan hutan
			c. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
369.	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan keanekaragaman hayati
			b. Program pengelolaan hutan
			c. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
370.	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan		
			a. Program pengelolaan keanekaragaman hayati
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
371.	Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan		
			a. Program pengelolaan keanekaragaman hayati
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
372.	Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
373.	Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota		
			a. Program pengelolaan keanekaragaman hayati
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
374.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	A.	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
		Penumbuhan nilai-nilai kewirausahaan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi

			c. Program pendidikan dan latihan perkoperasian
	B.	Peningkatan Peran Perdagangan dalam Perekonomian Daerah	
		Peningkatan daya saing sektor perdagangan	
		a.	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
		b.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
		c.	Program pengembangan ekspor
		d.	Program standardisasi dan perlindungan konsumen
		e.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
	C.	Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Daerah	
		Peningkatan produktivitas dan daya saing industri berwawasan lingkungan	
		a.	Program perencanaan dan pembangunan industri
		b.	Program pengendalian izin usaha industri
	D.	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada UMKM	
		Penumbuhan nilai-nilai kewirausahaan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi	
		a.	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
		b.	Program pemberdayaan UMKM
		c.	Program pengembangan UMKM
375.	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat		
		a.	Program pemberdayaan UMKM
		b.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		c.	Program perencanaan dan pembangunan industri
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
376.	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara		
		a.	Program pemberdayaan UMKM
		b.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		c.	Program perencanaan dan pembangunan industri
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
377.	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat		
		a.	Program pemberdayaan UMKM
		b.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		c.	Program perencanaan dan pembangunan industri
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
378.	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan		
		a.	Program pemberdayaan UMKM
		b.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		c.	Program perencanaan dan pembangunan industri
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

379.	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program pemberdayaan UMKM
			b. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
			c. Program perencanaan dan pembangunan industri
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
380.	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program pemberdayaan UMKM
			b. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
			c. Program perencanaan dan pembangunan industri
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
381.	Unit Pengelola Metrologi		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program standardisasi dan perlindungan konsumen
382.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
			a. Program pemberdayaan UMKM
			b. Program pendidikan dan latihan perkoperasian
			c. Program pengembangan UMKM
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
383.	Unit Industri Bahan dan Barang Teknik		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program standardisasi dan perlindungan konsumen
384.	Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
			a. Program standardisasi dan perlindungan konsumen
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
385.	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
386.	Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
387.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil (<i>Result Based Oriented</i>)		
	1)	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis bukti (<i>evidence based policy</i>)	
		a.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
		b.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		c.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

		2)	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penerapan iptek untuk mendukung kinerja pembangunan daerah
			a. Menciptakan kluster inovasi melalui kolaborasi pentahelix
			b. Program penelitian dan pengembangan daerah
388.	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
389.	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
390.	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
391.	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
392.	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
393.	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
394.	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		
			a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

			b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
395.	Pusat Riset dan Inovasi Daerah		
			a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
			b. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
396.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
	Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel		
			Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang pruden dan berkelanjutan
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan keuangan daerah
397.	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan keuangan daerah
398.	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan keuangan daerah
399.	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan keuangan daerah
400.	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan keuangan daerah
401.	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan keuangan daerah
402.	Pusat Data dan Informasi Keuangan		
			a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
			b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
403.	Badan Pendapatan Daerah		
	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
			Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
404.	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah

405.	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
406.	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
407.	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
408.	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
409.	Pusat Data dan Informasi Pendapatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
410.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
411.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
412.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
413.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
414.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
415.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanah Abang		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
416.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Menteng		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah

417.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Setiabudi		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
418.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Baru		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
419.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Lama		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
420.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
421.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Penjaringan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
422.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Grogol Petamburan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
423.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kembangan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
424.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Cakung		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
425.	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanjung Priok		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan pendapatan daerah
426.	Badan Pengelolaan Aset Daerah		
	Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel		
		Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset, penagihan piutang, penyelesaian kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan pengamanan barang milik daerah	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan barang milik daerah
427.	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan barang milik daerah

428.	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan barang milik daerah
429.	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan barang milik daerah
430.	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan barang milik daerah
431.	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan barang milik daerah
432.	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan barang milik daerah
433.	Pusat Penyimpanan Barang Daerah		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
434.	Pusat Data dan Informasi Aset		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program Pengelolaan barang milik daerah
435.	Unit Pengelolaan Jakarta <i>Asset Management Centre</i>		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan barang milik daerah
436.	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah		
			Mewujudkan BUMD Unggul Melalui Kapasitas Manajemen Berdaya Saing serta Aspek Keuangan yang Kuat dan Bersinergi
			Peningkatan nilai dan peran BUMD terhadap pelayanan dan pembangunan Jakarta
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program perekonomian dan pembangunan
437.	Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program perekonomian dan pembangunan
438.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa		
			Terlaksananya Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
			Perbaikan layanan pengadaan barang dan jasa yang menerapkan prinsip <i>value for money</i>
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

			b. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
439.	Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) Balaikota		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
440.	UPPBJ Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
441.	UPPBJ Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
442.	UPPBJ Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
443.	UPPBJ Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
444.	UPPBJ Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
445.	Badan Kepegawaian Daerah		
	Perbaikan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit		
		Peningkatan profesionalitas dan kinerja ASN	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program kepegawaian daerah
446.	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program kepegawaian daerah
447.	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program kepegawaian daerah
448.	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program kepegawaian daerah
449.	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program kepegawaian daerah

450.	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program kepegawaian daerah
451.	Pusat Data dan Informasi Kepegawaian		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program kepegawaian daerah
452.	Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai		
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program kepegawaian daerah
453.	Sekretariat Korpri		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
454.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	A.	Pengembangan Kompetensi melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan <i>Knowledge Management</i>	
	B.	Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan dan penggerak partisipasi masyarakat	
			Program kepegawaian daerah
		Pengembangan Kompetensi melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan <i>Knowledge Management</i>	
		Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan dan penggerak partisipasi Masyarakat	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengembangan SDM
455.	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik		
			a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
			b. Program Pengembangan SDM
456.	Pusat Data dan Informasi Pengembangan SDM		
			a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
			b. Program Pengembangan SDM
457.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Peningkatan Kapasitas Ketahanan Daerah terhadap Bencana	
		Pemenuhan pelayanan SPM sub urusan bencana dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahanan daerah	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penanggulangan bencana
458.	Pusat Data dan Informasi Kebencanaan		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
459.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	A.	Membangun Toleransi dan Kerukunan Masyarakat Multikultural	
		Pembinaan ideologi, kerukunan, kemasyarakatan dan kewaspadaan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan bebas dari segala ancaman	

			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
			c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
			d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
			e. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
	B.	Mewujudkan Peran Aktif Masyarakat pada Lembaga Demokrasi	
			a. Peningkatan partisipasi pemilu
			b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
460.	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat		
			a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
			b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
			c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
			d. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
			e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
461.	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara		
			a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
			b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
			c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
			d. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
			e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
462.	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat		
			a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
			b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
			c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
			d. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

			e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
463.	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan		
			a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
			b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
			c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
			d. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
			e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
464.	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur		
			a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
			b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
			c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
			d. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
			e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
465.	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
			a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
			b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
			c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
			d. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
			e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
466.	Kota Administrasi Jakarta Pusat		
	A.	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	
		Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal	
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

	B.	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	
			a. Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal
			b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			c. Program pengelolaan kota administrasi
467.	Kecamatan Tanah Abang - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
468.	Kecamatan Menteng - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
469.	Kecamatan Senen - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
470.	Kecamatan Cempaka Putih - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
471.	Kecamatan Johar Baru - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
472.	Kecamatan Kemayoran - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
473.	Kecamatan Sawah Besar - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

474.	Kecamatan Gambir - Jakarta Pusat		
			a. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			b. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
475.	Kelurahan Kebon Melati - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
476.	Kelurahan Kebon Kacang - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
477.	Kelurahan Pegangsaan - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
478.	Kelurahan Cikini - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
479.	Kelurahan Gondangdia - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
480.	Kelurahan Kebon Sirih - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
481.	Kelurahan Gelora - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
482.	Kelurahan Kenari - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
483.	Kelurahan Paseban - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
484.	Kelurahan Kramat - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan

			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
485.	Kelurahan Kwitang - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
486.	Kelurahan Senen - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
487.	Kelurahan Bungur - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
488.	Kelurahan Kampung Bali - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
489.	Kelurahan Rawasari - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
490.	Kelurahan Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
491.	Kelurahan Cempaka Putih Barat - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
492.	Kelurahan Bendungan Hilir - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
493.	Kelurahan Johar Baru - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
494.	Kelurahan Kampung Rawa - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
495.	Kelurahan Galur - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan

			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
496.	Kelurahan Tanah Tinggi - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
497.	Kelurahan Karet Tengsin - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
498.	Kelurahan Harapan Mulia - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
499.	Kelurahan Cempaka Baru - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
500.	Kelurahan Sumur Batu - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
501.	Kelurahan Serdang - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
502.	Kelurahan Kebon Kosong - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
503.	Kelurahan Kemayoran - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
504.	Kelurahan Utan Panjang - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
505.	Kelurahan Gunung Sahari Selatan - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
506.	Kelurahan Petamburan - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan

			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
507.	Kelurahan Pasar Baru - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
508.	Kelurahan Karang Anyar - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
509.	Kelurahan Kartini - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
510.	Kelurahan Gunung Sahari Utara - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
511.	Kelurahan Mangga Dua Selatan - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
512.	Kelurahan Menteng - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
513.	Kelurahan Cideng - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
514.	Kelurahan Petojo Selatan - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
515.	Kelurahan Gambir - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
516.	Kelurahan Kebon Kelapa - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
517.	Kelurahan Petojo Utara - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan

			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
518.	Kelurahan Duri Pulo - Jakarta Pusat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
519.	Kota Administrasi Jakarta Utara		
	A.	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	
		Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal	
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
	B.	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	
		Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan kota administrasi
520.	Kecamatan Penjaringan - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
521.	Kecamatan Pademangan - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
522.	Kecamatan Tanjung Priok - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
523.	Kecamatan Koja - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

524.	Kecamatan Cilincing - Jakarta Utara		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>koordinasi</u> ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
525.	Kelurahan Pluit - Jakarta Utara		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
526.	Kelurahan Kamal Muara - Jakarta Utara		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
527.	Kelurahan Ancol - Jakarta Utara		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
528.	Kelurahan Pademangan Barat - Jakarta Utara		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
529.	Kelurahan Pademangan Timur - Jakarta Utara		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
530.	Kelurahan Kapuk Muara - Jakarta Utara		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
531.	Kelurahan Sunter Jaya - Jakarta Utara		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
532.	Kelurahan Sunter Agung - Jakarta Utara		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
533.	Kelurahan Papanggo - Jakarta Utara		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
534.	Kelurahan Warakas - Jakarta Utara		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan

			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
535.	Kelurahan Sungai Bambu - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
536.	Kelurahan Kebon Bawang - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
537.	Kelurahan Tanjung Priok - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
538.	Kelurahan Pejagalan - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			d. Program pengelolaan kecamatan
539.	Kelurahan Tugu Utara - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
540.	Kelurahan Tugu Selatan - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
541.	Kelurahan Rawa Badak Utara - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
542.	Kelurahan Koja - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
543.	Kelurahan Rawa Badak Selatan - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
544.	Kelurahan Lagoa - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
545.	Kelurahan Penjaringan - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan

			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
546.	Kelurahan Kelapa Gading Timur - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
547.	Kelurahan Kelapa Gading Barat - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
548.	Kelurahan Pegangsaan Dua - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
549.	Kelurahan Sukapura - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
550.	Kelurahan Rorotan - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
551.	Kelurahan Marunda - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
552.	Kelurahan Cilincing - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
553.	Kelurahan Semper Timur - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
554.	Kelurahan Semper Barat - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
555.	Kelurahan Kalibaru - Jakarta Utara		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

556.	Kota Administrasi Jakarta Barat		
	A.	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	
		Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal	
		a.	Program pengelolaan kecamatan
		b.	Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
		c.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
	B.	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	
		Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal	
		a.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
		b.	Program pengelolaan kota administrasi
557.	Kecamatan Kebon Jeruk - Jakarta Barat		
		a.	Program pengelolaan kecamatan
		b.	Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
		c.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
558.	Kecamatan Kembangan - Jakarta Barat		
		a.	Program pengelolaan kecamatan
		b.	Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
		c.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
559.	Kecamatan Taman Sari - Jakarta Barat		
		a.	Program pengelolaan kecamatan
		b.	Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
		c.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
560.	Kecamatan Tambora - Jakarta Barat		
		a.	Program pengelolaan kecamatan
		b.	Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
		c.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
561.	Kecamatan Palmerah - Jakarta Barat		
		a.	Program pengelolaan kecamatan
		b.	Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
		c.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

562.	Kecamatan Grogol Petamburan - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
563.	Kecamatan Kalideres - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
564.	Kelurahan Kedoya Selatan - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
565.	Kelurahan Sukabumi Selatan - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
566.	Kelurahan Kembangan Selatan - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
567.	Kelurahan Meruya Utara - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
568.	Kelurahan Meruya Selatan - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
569.	Kelurahan Srengseng - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
570.	Kelurahan Joglo - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
571.	Kelurahan Kembangan Utara - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

572.	Kecamatan Cengkareng - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
573.	Kelurahan Cengkareng Barat - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
574.	Kelurahan Cengkareng Timur - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
575.	Kelurahan Kapuk Jakarta - Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
576.	Kelurahan Duri Kosambi - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
577.	Kelurahan Rawa Buaya - Jakarta Barat		
			a. Program Pengelolaan Kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
578.	Kelurahan Kedaung Kali Angke - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
579.	Kelurahan Sukabumi Utara - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
580.	Kelurahan Kamal - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
581.	Kelurahan Tegal Alur - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
582.	Kelurahan Pegadungan - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan

			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
583.	Kelurahan Kalideres - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
584.	Kelurahan Semanan - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
585.	Kelurahan Kelapa Dua - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
586.	Kelurahan Tomang - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
587.	Kelurahan Tanjung Duren Utara - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
588.	Kelurahan Grogol - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
589.	Kelurahan Jelambar - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
590.	Kelurahan Jelambar Baru - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
591.	Kelurahan Wijaya Kusuma - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
592.	Kelurahan Tanjung Duren Selatan - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
593.	Kelurahan Duri Kepa - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan

			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
594.	Kelurahan Palmerah - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
595.	Kelurahan Kemanggisan - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
596.	Kelurahan Slipi - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
597.	Kelurahan Kota Bambu Utara - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
598.	Kelurahan Jati Pulo - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
599.	Kelurahan Kota Bambu Selatan - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
600.	Kelurahan Kedoya Utara - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
601.	Kelurahan Kali Anyar - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
602.	Kelurahan Duri Utara - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
603.	Kelurahan Tanah Sereal - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
604.	Kelurahan Krendang - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan

			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
605.	Kelurahan Jembatan Besi - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
606.	Kelurahan Angke - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
607.	Kelurahan Jembatan Lima - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
608.	Kelurahan Duri Selatan - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
609.	Kelurahan Tambora - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
610.	Kelurahan Pekojan - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
611.	Kelurahan Roa Malaka - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
612.	Kelurahan Kebon Jeruk - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
613.	Kelurahan Krukut - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
614.	Kelurahan Maphar - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
615.	Kelurahan Taman Sari - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan

			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
616.	Kelurahan Tangki - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
617.	Kelurahan Mangga Besar - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
618.	Kelurahan Keagungan - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
619.	Kelurahan Glodok - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
620.	Kelurahan Pinangsia - Jakarta Barat		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
621.	Kota Administrasi Jakarta Selatan		
	A.	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	
		Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal	
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
	B.	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	
		Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan kota administrasi
622.	Kecamatan Kebayoran Lama - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
623.	Kecamatan Pesanggrahan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan

			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
624.	Kecamatan Pasar Minggu - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
625.	Kecamatan Mampang Prapatan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
626.	Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
627.	Kecamatan Kebayoran Baru - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
628.	Kecamatan Setiabudi - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
629.	Kecamatan Tebet - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
630.	Kecamatan Cilandak - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
631.	Kelurahan Petukangan Selatan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

632.	Kelurahan Petukangan Utara - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
633.	Kelurahan Ulujami - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
634.	Kelurahan Bintaro - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
635.	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
636.	Kelurahan Pasar Minggu - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
637.	Kelurahan Jatipadang - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
638.	Kelurahan Ragunan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
639.	Kelurahan Cilandak Timur - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
640.	Kelurahan Kebagusan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
641.	Kelurahan Pejaten Barat - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
642.	Kelurahan Pejaten Timur - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

643.	Kecamatan Jagakarsa - Jakarta Selatan		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
644.	Kelurahan Jagakarsa - Jakarta Selatan		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
645.	Kelurahan Ciganjur - Jakarta Selatan		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
646.	Kelurahan Srengseng Sawah - Jakarta Selatan		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
647.	Kelurahan Lenteng Agung - Jakarta Selatan		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
648.	Kelurahan Tanjung Barat - Jakarta Selatan		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
649.	Kelurahan Cipadak - Jakarta Selatan		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
650.	Kelurahan Pondok Pinang - Jakarta Selatan		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
651.	Kelurahan Tegal Parang - Jakarta Selatan		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
652.	Kelurahan Mampang Prapatan - Jakarta Selatan		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
653.	Kelurahan Pela Mampang - Jakarta Selatan		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan

			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
654.	Kelurahan Kuningan Barat - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
655.	Kelurahan Bangka - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
656.	Kelurahan Cipulir - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program Pemberdayaan Masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
657.	Kelurahan Pancoran - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
658.	Kelurahan Duren Tiga - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
659.	Kelurahan Kalibata - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
660.	Kelurahan Rawajati - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
661.	Kelurahan Pangadegan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
662.	Kelurahan Cikoko - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
663.	Kelurahan Grogol Selatan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
664.	Kelurahan Gandaria Utara - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan

			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
665.	Kelurahan Cipete Utara - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
666.	Kelurahan Pulo - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
667.	Kelurahan Petogogan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
668.	Kelurahan Melawai - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
669.	Kelurahan Kramat Pela - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
670.	Kelurahan Gunung - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
671.	Kelurahan Selong - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
672.	Kelurahan Rawa Barat - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
673.	Kelurahan Senayan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
674.	Kelurahan Grogol Utara - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
675.	Kelurahan Karet Semanggi - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan

			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
676.	Kelurahan Kuningan Timur - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
677.	Kelurahan Karet Kuningan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
678.	Kelurahan Karet - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
679.	Kelurahan Menteng Atas - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
680.	Kelurahan Pasar Manggis - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
681.	Kelurahan Guntur - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
682.	Kelurahan Setia Budi - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
683.	Kelurahan Kebayoran Lama Utara - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
684.	Kelurahan Menteng Dalam - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
685.	Kelurahan Tebet Barat - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
686.	Kelurahan Tebet Timur - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan

			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
687.	Kelurahan Kebon Baru - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
688.	Kelurahan Bukit Duri - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
689.	Kelurahan Manggarai Selatan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
690.	Kelurahan Manggarai - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
691.	Kelurahan Pesanggrahan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
692.	Kelurahan Lebak Bulus - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
693.	Kelurahan Pondok Labu - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
694.	Kelurahan Cilandak Barat - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
695.	Kelurahan Gandaria Selatan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
696.	Kelurahan Cipete Selatan - Jakarta Selatan		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

697.	Kota Administrasi Jakarta Timur		
	A.	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	
		Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal	
		a.	Program pengelolaan kecamatan
		b.	Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
		c.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
	B.	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	
		Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal	
		a.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
		b.	Program pengelolaan kota administrasi
698.	Kecamatan Pasar Rebo - Jakarta Timur		
		a.	Program pengelolaan kecamatan
		b.	Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
		c.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
699.	Kecamatan Cakung - Jakarta Timur		
		a.	Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
		b.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
		c.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
700.	Kecamatan Matraman - Jakarta Timur		
		a.	Program pengelolaan kecamatan
		b.	Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
		c.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
701.	Kecamatan Ciracas - Jakarta Timur		
		a.	Program pengelolaan kecamatan
		b.	Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
		c.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
		d.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
702.	Kecamatan Kramat Jati - Jakarta Timur		
		a.	Program pengelolaan kecamatan
		b.	Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
		c.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
703.	Kecamatan Makasar - Jakarta Timur		
		a.	Program pengelolaan kecamatan
		b.	Program pemberdayaan masyarakat kelurahan

			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
704.	Kecamatan Cipayung - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
705.	Kecamatan Jatinegara - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
706.	Kecamatan Duren Sawit - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
707.	Kelurahan Baru Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
708.	Kelurahan Susukan - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
709.	Kelurahan Ciracas Jakarta - Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
710.	Kelurahan Cijantung - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
711.	Kelurahan Cipayung - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
712.	Kelurahan Lubang Buaya - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

713.	Kelurahan Ceger - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
714.	Kelurahan Bambu Apus - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
715.	Kelurahan Setu - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
716.	Kelurahan Cilangkap - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
717.	Kelurahan Munjul - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
718.	Kelurahan Pondok Ranggon - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
719.	Kelurahan Gedong - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
720.	Kelurahan Tengah - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
721.	Kelurahan Kampung Dukuh - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
722.	Kelurahan Kramat Jati - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
723.	Kelurahan Batu Ampar - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

724.	Kelurahan Bale Kambang - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
725.	Kelurahan Cililitan - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
726.	Kelurahan Cawang - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
727.	Kelurahan Cibubur - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
728.	Kelurahan Cipinang Melayu - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
729.	Kelurahan Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
730.	Kelurahan Kebon Pala - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
731.	Kelurahan Makasar - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
732.	Kelurahan Pinang Ranti - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
733.	Kelurahan Rambutan - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
734.	Kelurahan Kampung Melayu - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

735.	Kelurahan Bidara Cina - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
736.	Kelurahan Bali Mester - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
737.	Kelurahan Rawa Bunga - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
738.	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
739.	Kelurahan Cipinang Muara - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
740.	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
741.	Kelurahan Cipinang Besar Utara - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
742.	Kelurahan Kelapa Dua Wetan - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
743.	Kelurahan Klender - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
744.	Kelurahan Pondok Bambu - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
745.	Kelurahan Duren Sawit - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

746.	Kelurahan Malaka Sari - Jakarta Timur		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
747.	Kelurahan Malaka Jaya - Jakarta Timur		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
748.	Kelurahan Pondok Kopi - Jakarta Timur		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
749.	Kelurahan Pondok Kelapa - Jakarta Timur		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
750.	Kelurahan Baru - Jakarta Timur		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
751.	Kelurahan Pisangan Baru - Jakarta Timur		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
752.	Kelurahan Utan Kayu Selatan - Jakarta Timur		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
753.	Kelurahan Utan Kayu Utara - Jakarta Timur		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
754.	Kelurahan Kayu Manis - Jakarta Timur		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
755.	Kelurahan Palmeriam - Jakarta Timur		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi
756.	Kelurahan Kebon Manggis - Jakarta Timur		
			a. Program <u>pengelolaan</u> kecamatan
			b. Program <u>pemberdayaan</u> masyarakat kelurahan
			c. Program <u>penunjang</u> urusan pemerintahan daerah provinsi

757.	Kelurahan Kalisari - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
758.	Kelurahan Pisangan Timur - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
759.	Kelurahan Cipinang - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
760.	Kelurahan Jatinegara Kaum - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
761.	Kelurahan Pulogadung - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
762.	Kelurahan Rawamangun - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
763.	Kelurahan Jati - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
764.	Kelurahan Kayu Putih - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
765.	Kelurahan Pekayon - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
766.	Kelurahan Jatinegara - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
767.	Kelurahan Rawa Terate - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

768.	Kelurahan Penggilingan - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
769.	Kelurahan Pulo Gebang - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
770.	Kelurahan Ujung Menteng - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
771.	Kelurahan Cakung Timur - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
772.	Kelurahan Cakung Barat - Jakarta Timur		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
773.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
	A.	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kabupaten yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	
		Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang optimal	
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
	B.	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kabupaten yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	
		Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang optimal	
			a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			b. Program pengelolaan kabupaten administrasi
774.	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara - Kepulauan Seribu		
			a. Program pengelolaan kecamatan
			b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
			c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

775.	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan - Kepulauan Seribu			a. Program pengelolaan kecamatan
				b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
				c. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
				d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
776.	Kelurahan Pulau Kelapa - Kepulauan Seribu			a. Program pengelolaan kecamatan
				b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
				c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
777.	Kelurahan Pulau Harapan - Kepulauan Seribu			a. Program pengelolaan kecamatan
				b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
				c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
778.	Kelurahan Pulau Panggang - Kepulauan Seribu			a. Program pengelolaan kecamatan
				b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
				c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
779.	Kelurahan Pulau Untung Jawa - Kepulauan Seribu			a. Program pengelolaan kecamatan
				b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
				c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
780.	Kelurahan Pulau Tidung - Kepulauan Seribu			a. Program pengelolaan kecamatan
				b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
				c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
781.	Kelurahan Pulau Pari - Kepulauan Seribu			a. Program pengelolaan kecamatan
				b. Program pemberdayaan masyarakat kelurahan
				c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
782.	Perumda Air Minum Jaya			a. Transisi dan transformasi perusahaan
				b. Percepatan peningkatan pelayanan dan ketahanan air minum di Wilayah DKI Jakarta
				c. Pengembangan pelayanan air bersih di Kepulauan Seribu
				d. Pelayanan air bersih untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
				e. Pelayanan air bersih ke fasilitas umum
				f. Pilot project <i>Drinking Water Area</i> (DWA)
				g. Penurunan tingkat kehilangan air
783.	Perumda Dharma Jaya			a. Revitalisasi sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)
				b. Memperluas jangkauan realisasi kerja sama operasional dalam perdagangan daging ayam dan sapi termasuk pengelolaan <i>meatshop</i> terpadu

			c. Mengoptimalkan aset di Serang, Cakung, Pulogadung dan aset lainnya
			d. Menaikkan level standardisasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
			e. Mengembangkan dan mengoptimalkan volume perdagangan daging dan ternak
784.	Perumda Pembangunan Sarana Jaya		
			a. Meningkatkan implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)
			b. Implementasi manajemen kinerja korporasi
			c. Meningkatkan kerja sama usaha
785.	Perumda Pasar Jaya		
			a. Membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana <u>perpasaran</u>
			b. Menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area pasar
			c. Menyelenggarakan usaha jasa lain yang berhubungan dengan kegiatan pasar
786.	Perumda Pengolahan Air Limbah Jaya		
			a. Pengembangan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Zona 0
			b. Pembangunan SPALD-T kawasan TB. Simatupang
			c. Pengelolaan limbah B3 medis
			d. Pembangunan jaringan distribusi air daur ulang
			e. Revitalisasi tangka septik rumah tangga
787.	PT Food Station Tjipinang		
			a. Melakukan perluasan kerja sama dan budi daya <u>pertanian</u>
			b. Modernisasi dan <u>penerapan teknologi pertanian</u>
			c. Mengintegrasikan sistem produksi, penyimpanan, dan distribusi serta melakukan kerja sama dengan mitra-mitra <u>produksi</u>
			d. Mendekatkan lokasi bahan baku, titik produksi, <u>penyimpanan</u> , dan distribusi
			e. Menjalin kemitraan antar pulau dengan pelaku-pelaku usaha setempat
			f. Melakukan ekspor produk-produk perusahaan
			g. Menggencarkan penetrasi produk perusahaan melalui jaringan distribusi modern retail, pasar tradisional, <i>e-commerce</i> , serta kerja sama dengan BUMN, BUMD, Instansi Pemerintahan dan Perusahaan Swasta
			h. Konsistensi menjaga ketahanan pangan dan kestabilan harga <u>pangan</u>
788.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk		
			a. Peningkatan <u>pendapatan</u>
			b. Peningkatan kualitas layanan dan produk kepada <i>customer</i>
			c. Menjaga <i>sustainability</i> pertumbuhan kinerja laba bersih
			d. Mengoptimalisasi aset yang dimiliki dan melakukan inovasi untuk menambah <i>revenue stream</i>

789.	PT Jakarta Propertindo		
			a. Mempercepat pemanfaatan aset dengan melakukan aktivasi pengelolaan aset Jakarta International Stadium, Taman Ismail Marzuki, Velodrome, Equestrian, dan aset lainnya untuk keberlanjutan perusahaan dan penguatan portofolio bisnis melalui proyek Lintas Raya Terpadu (LRT), <i>Intermediate Treatment Facility</i> (ITF) Sunter, dan ITF Wilayah Layanan Barat
			b. Optimalisasi pendanaan untuk menjaga kesehatan keuangan dengan meningkatkan porsi <i>revenue</i>
			c. Bersinergi dengan anak perusahaan dengan memanfaatkan kapasitas anak perusahaan untuk saling memberikan nilai tambah dengan <i>penyelerasan portofolio</i>
			d. Efisiensi dengan meningkatkan kualitas produk dan menjaga biaya produksi yang rendah
790.	PT Bank DKI Jakarta		
			a. Program setoran awal Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)
			b. Program <i>free top up</i>
			c. Program <i>jakone vaganza</i>
			d. Program hadiah langsung <i>merchant</i>
			e. Program <i>giro connect</i>
			f. Program <i>racing merchant</i> ritel
			g. Program <i>racing</i> abang pulau seribu
			h. Program insentif
			i. Program akuisisi <i>merchant modern</i>
			j. Program <i>cashback</i> tabungan valas
			k. Program <i>giro surprise</i>
791.	PT Jakarta Tourisindo		
			a. Pelaksanaan pekerjaan Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang ada di bisnis pariwisata dan unit usaha
			b. Membuka peluang usaha baru melalui bidang pariwisata
			c. Optimalisasi <i>camping ground</i> Grand Cempaka Resort melalui kerja sama dengan Bobobox
			d. Melakukan reviu dan optimalisasi kerja sama eksisting pada aset hotel dan <i>sport center</i>
			e. Pengembangan usaha lainnya untuk optimalisasi aset TB. Simatupang dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya
792.	PT Mass Rapid Transit Jakarta		
			a. Mengoptimalkan posisi finansial
			b. Memaksimalkan pendapatan
			c. Mencapai efektivitas biaya operasional
			d. Mencapai keunggulan pelayanan
			e. Menyelesaikan penugasan pelayanan publik
			f. Mencapai kemandirian korporasi
			g. Mengembangkan bisnis yang berkelanjutan
			h. Memperkuat pengelolaan pengetahuan
			i. Memperkuat manajemen talenta
			j. Mencapai keunggulan <i>Governance, Risk and Compliance</i> (GRC)

793.	PT Transportasi Jakarta		
			a. Mengoptimalkan pendapatan <i>Non - Public Service Obligation</i> (Non - PSO)
			b. Mencapai efektivitas biaya perusahaan
			c. Optimalisasi tata kelola perusahaan melalui GCG
			d. Meningkatkan kapabilitas SDM dan inovasi
			e. Transformasi digital melalui penguatan kapabilitas informasi teknologi
			f. Mengoptimalkan jumlah pelanggan dan memaksimalkan pengalaman pelanggan
			g. <i>Operational excellence</i> melalui optimalisasi rencana operasi, kolaborasi bersama pihak eksternal, dan integrasi antar moda
			h. Meningkatkan kualitas serta pemanfaatan prasarana halte dan fasilitas pendukung lainnya
			i. Mencapai keunggulan operasional
794.	PT Penjamin Kredit Daerah		
			a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung tercapainya peningkatan kinerja dan terciptanya GCG
			b. Meningkatkan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) yang disalurkan oleh Bank DKI, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Kepulauan Seribu
			c. Meningkatkan penjaminan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh UMK pada SKPD dan BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
			d. Mengelola dana investasi dengan optimal dalam bentuk deposito, obligasi dan reksa dana serta bentuk investasi lainnya
			e. Melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin lainnya atau perusahaan asuransi dalam rangka mitigasi risiko melalui mekanisme penjaminan ulang
			f. Meningkatkan kinerja perusahaan dengan melakukan efisiensi dan efektivitas pencapaian hasil kinerja dengan pendekatan pemanfaatan teknologi informasi
			g. Melakukan pengembangan produk baru sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan mencari sumber baru penerimaan perusahaan
			h. Partisipasi pada pameran dagang, melakukan misi dagang, meningkatkan wawasan para pelaku usaha



Hj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HIRU BUDI HARTONO

KETERANGAN									
KETERANGAN									
4	Dinas Sumber Daya Air	Audit Kinerja atas Pengelolaan Alat Berat pada UP Peralatan dan Perbekalan Dinas Sumber Daya Air	1. Mendukung sasaran RPD Kabupaten Tasikmalaya dan Kecamatan Kota dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Terdapat alat berat yang tidak dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan DSDA	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas pengelolaan alat berat dalam menunjang kegiatan Dinas Sumber Daya Air	Pengelolaan alat Berat di UP Alut Dinas Sumber Daya Air Tahun 2022-2023	1. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas Pengelolaan Alat Berat pada UP Peralatan dan Perbekalan 2. Melakukan pengujian atas Pengelolaan Alat Berat pada UP Peralatan dan Perbekalan	0	40	66.000.000
5	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Audit Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (Data Cerik)	1. Program Penanggulangan Kemiskinan (KSD No. 4) 2. Data Cerik digunakan sebagai data pendukung bagi penerima Bantuan Sosial (Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial) 3. Data Cerik sebagai pendukung data untuk satu data pembangunan 4. Anggaran Program sebesar Rp6.643.668.683,00 5. Biaya Operasional Kader Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Satu Pintu 6 Wilayah sebesar Rp456.684.000,00	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas pengelolaan Data Cerik (Data Cerik) sehingga data yang dihasilkan valid dan akurat	1. Kelengkapan Pengelolaan Data Cerik (SDP/ISMA) atas seluruh pengelolaan Data Cerik 2. Pengelolaan Data Cerik sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Keluarga DPPAPP yang tercantum pada Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	1. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas Program Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (Data Cerik) 2. Melakukan pengujian atas: a. Persentase keluarga yang terdata melalui Cerik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan b. Peningkatan data keluarga miskin yang terdata yang dihasilkan oleh Dinaswina	2	30	54.000.000
6	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Industri kreatif	Audit Dengan Tujuan Tertentu Pengembangan Pariwisata dan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Merupakan Kegiatan Strategis Daerah Nomor 3.5. Pengembangan Pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif - Penguatan Wisata dan Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) - Pengembangan Kawasan Destinasi Jalanta - Penerapan strategi Grand Design Ekonomi Kreatif DKI Jakarta	Memberikan keyakinan yang memadai atas kesesuaian pelaksanaan pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif dengan indikator target dan ketentuan yang berlaku	Memati keputusan terhadap ketentuan yang berlaku dan Sistem Pengendalian Intern atas: 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; 2. Program Penguatan Periklanan; 3. Program Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tahun Anggaran 2023).	1. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas Program Pengembangan Pariwisata dan Ekosistem Ekonomi Kreatif 2. Melakukan pengujian atas seluruh kegiatan yang terdapat pada program-program pada ruang lingkup yang bersumber dari APBD TA 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk capaian target	0	40	66.000.000
7	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Audit Dengan Tujuan Tertentu Penyediaan Hunian pada Menara Swasana Nuanas Pondok Cilanglop (Hunian Subaidi DP Rp0 dan Hunian Komersial)	Tidak optimalnya penjualan hunian pada Menara Swasana Nuanas Pondok Cilanglop dan Menara Kanaya Nuanas Cilanglop (Hunian Subaidi DP Rp0 dan Hunian Komersial)	Memberikan keyakinan yang memadai atas kesesuaian pelaksanaan program Penyediaan Hunian pada Menara Swasana Nuanas Pondok Cilanglop dan Menara Kanaya Nuanas Cilanglop yang berlaku	1. Penyediaan dan tingkat hunian pada Menara Swasana Nuanas Pondok Cilanglop 2. Penyediaan dan tingkat hunian pada Menara Kanaya Nuanas Cilanglop	1. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas Program Penyediaan Hunian pada Menara Swasana Nuanas Pondok Cilanglop dan Menara Kanaya Nuanas Cilanglop 2. Melakukan pengujian atas Realisasi pendapatan, biaya KPI, dan PMD pada Penyediaan dan tingkat hunian pada Menara Swasana Nuanas Pondok Cilanglop dan Menara Kanaya Nuanas Cilanglop	0	40	66.000.000

Keterangan:
I Inspektoriat Pembantu I
II Inspektoriat Pembantu II
III Inspektoriat Pembantu III
IV Inspektoriat Pembantu IV
V Inspektoriat Pembantu V
INV Inspektoriat Pembantu Bidang Investigasi
WIL Seluruh Inspektoriat Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi
SKT Sekretariat

8	Perumda Air Minum Jaya	Audit Kepatuhan atas Objek BGS/BSQ yang telah berakhir jangka waktu pengoperasiannya dan akan diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---	------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

- I Inspektorat Pembantu I
- II Inspektorat Pembantu II
- III Inspektorat Pembantu III
- IV Inspektorat Pembantu IV
- V Inspektorat Pembantu V
- INV Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi
- WIL Seluruh Inspektorat Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi
- SKT Sekretariat

[illegible]

- I Inspektoral Pembantu I
- II Inspektoral Pembantu II
- III Inspektoral Pembantu III
- IV Inspektoral Pembantu IV
- V Inspektoral Pembantu V
- INV Inspektoral Pembantu Bidang Investigasi
- SKL Seluruh Inspektoral Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi
- SKT Sekretariat

17	Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman	Istisna atas Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengolahan Air Limbah, dan Peningkatan Standar Kelayakan Fasilitas (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) Rumah Susun Sewa (Rusunawo) dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2024		IV	1. Merupakan arahan kebijakan Kementerian terkait Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting 2. Merupakan isu strategis daerah KSD No 8 Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan; Sub KSD No 16 Peningkatan Akses air bersih perijinan. 3. Mempakan isu strategis daerah KSD No 8 Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan; Sub KSD No 17 Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 4. Mendukung sasaran RPD Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Air Limbah, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 5. Merupakan temuan BPK tentang fasilitas PSU rusunawa belum memadai	Memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Pelaksanaan atas pendistribusian subsidi air bersih dan air limbah 2. Pelaksanaan atas pemenuhan standar kelayakan PSU di rumah susun	Melakukan pengujian atas: 1. Pendistribusian subsidi air bersih dan air limbah tepat sasaran 2. Pemenuhan standar kelayakan PSU di rumah susun	0	40	120.000.000	
18	Dinas Perrindustrialion, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Industri Tertekit	Retu Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024		II	II II	Amend Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penguapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Ushaa Mikro, Ushaa Kecil, dan Koperasi Dalam Ragka Menyukekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan	Penganggaran, Pencanaan, dan Realisasi Fnggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah	1. Meyakini bahwa Perangkat Daerah telah mengalokasikan minimal 40% anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Ushaa Mikro, Ushaa Kecil, dan Kooperai dari hasil produki dalam negeri; 2. Meluri realiasi PDN melalui daya tangkap kemampuan keuangan komimen dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaki; 3. Meyakini bahwa penyusunan penggunaan PDN (barang wajib preferensi harga dipertimbangkan dalam penyusunan RUP, KAK, dan HPS Perangkat Daerah); 4. Meluri keaslian pasadaan barang asli PDN tidak dilakuan melali impor.	12	0	40	72.000.000

Keterangan:

- I Inspektoral Pembantu I
II Inspektoral Pembantu II
III Inspektoral Pembantu III
IV Inspektoral Pembantu IV
V Inspektoral Pembantu V
INV Inspektoral Pembantu Bidang Investigasi
WKS Seluruh Inspektoral Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi Sekretariat

MONITORING DAN EVALUASI

1	Seluruh PD	Monitoring pelaksanaan RB General dan RB Tematik	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	Menganalisis bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah sesuai dengan roadmap yang telah sesuai dalam pemetaan masalah yang telah pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta sebagai ibu kota dan juga diadilkan pelomaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta	RE General dan RB Tematik	Melakukan pengujian atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik terhadap Seluruh Perangkat Daerah	15	0	40	90.000.000
2	Seluruh PD	Monitoring pelaksanaan pengadaan PSK	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PSK untuk Jabatan Pungional 2. Surat Kemendagri Nomor 800.1.2.2/2024/J tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pengawasan Penetnmaan PSK Tahun Anggaran 2023	Menganalisis bahwa pelaksanaan pengadaan ppjk Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan/peraturan/perundang-undangan;	1. Tahap perencanaan 2. Tahap penggunaan lowongan dan anjuran 3. Tahap selesai administrasi	Melakukan pengujian atas labahan pelaksanaan pengadaan PPJK Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan/peraturan/perundang-undangan	15	0	40	90.000.000
3	Seluruh PD	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Reviu Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Menganalisis hasil reviu Manajemen Risiko dan rekomendasi telah di tindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	Penerapan: Manajemen Risiko Tahun 2024	Melakukan pengujian atas tidak lanjut revidasi permasalahan dan Risiko Seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	20	0	30	90.000.000
4	Seluruh PD	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	Menilai tingkat maturitas implementasi SIP	Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIP) sebagai Penjamin Kualitas tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah	Quality assurance terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: 1. Lingkungan pengendalian; 2. Identifikasi risiko; 3. Kegiatan pengendalian; 4. Informasi dan komunikasi; dan 5. Penentuan pengendalian intern.	20	\$5	40	\$50.000.000
5	Seluruh PD	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kegiatan Strategis Daerah dan Peraturan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran	Laporan pertanggungjawaban Tahun 2023 atas hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur	1. Melakukan pengujian atas tidak lanjut rekomendasi penerapan SAKIP Seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Melakukan penilaian atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja SAKIP Tahun 2023	20	25	40	270.000.000
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Memajukan Saaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026	Menilai keberhasilan atas pelaksanaan Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Menilai kaputuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan Sistem Pengendalian Interni atas: 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas saaran peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja 2. Melakukan pengujian terhadap capaian program: - pemenuhan tenaga kerja - pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja - penempatan tenaga kerja	11	0	40	66.000.000
7	PT Food Station Tjipining Jaya dan DKPKP	Evaluasi Pelaksanaan Pangan Murah Beraubsidi	Merupakan Kegiatan Strategis Daerah Nomor 3,9 Pengendalian Inidan dan Pengawasan Ketahanan Pangan, keamanan pangan, jaminan ketersediaan pangan serta kestabilan harga pangan	Menilai keberhasilan atas Pelaksanaan Pangan Murah Beraubsidi	1. Target dan Realisasi RKAP Tahun 2023 2. Program Diversifikasi Pangan pada DKPKP	1. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas program pelaksanaan pangan murah beraubsidi 2. Melakukan pengujian terhadap pengadaan bahan pangan subsidi termasuk pendistribusian pangan, ketersediaan dan keamanan mutu pangan beraubsidi	12	0	40	72.000.000

Keterangan:

- I Inspektoral Pembantu I
- II Inspektoral Pembantu II
- III Inspektoral Pembantu III
- IV Inspektoral Pembantu IV
- V Inspektoral Pembantu V
- INV Inspektoral Pembantu Bidang Investigasi
- WIL Seluruh Inspektoral Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi SKT Sekretaris

8	Dinas Perhubungan dan Infrastruktur Terkait	Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Fasilitas dan Layanan Transportasi Terintegrasi							Mempaparkan Kegiatan Strategis Daerah Nomor 2 - Penerimaan Pembangunan Kemacetan	Menilai keberhasilan atas Pelaksanaan Peningkatan Fasilitas dan Layanan Transportasi Terintegrasi	1. Pembangunan fasilitas integrasi mode pada simpul transportasi (antara lain penataan kawasan stasiun KAI, revitalisasi halte Transjakarta, 2. Melakukan pengujian atas kesediaan SPM pada Fasilitas Penataan kawasan stasiun, Revitalisasi halte Transjakarta, Terminal Bus Tipe A (Kampung Rambutan, Pulogebang, Kali Deres) dan pengembangan sistem angkutan umum sesuai perkotaan	11	0	40	66.000.000
9	PT MRT Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT TransJakarta, BP (BUMD)	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas dan Layanan Berorientasi Transit				II	II		1. Merupakan salah satu kegiatan strategis daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 yaitu Pengembangan Transit Oriented (TOD) No 28; 2. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan angkutan publik yang tercantum dalam dokumen RRP/PD 2005-2025; 3. Merupakan isu transportasi nasional (RPNUN - Proyek Prioritas Nasional) Mendatori dari Presiden melalui BPKP dan Kementerian	Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit	1. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas program pembangunan dan pengembangan kawasan berorientasi transit 2. Melakukan pengujian atas pemenuhan standar sarana dan prasarana Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit 2. Melakukan pengujian atas Pengelolaan Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit.	11	0	60	99.000.000
10	Badan Penyelidikan Pengadaan Barang/Jasa	Monitoring dan Evaluasi atas Penyusunan Anggaran Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa termasuk monitoring SIRUP dan FSDN	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL		Memiliki keberhasilan atas realisasi pembangunan infrastruktur jalan tol dan pengadaan barang/jasa serta penguasaan komponen produk dalam negeri	Realisasi penyerapan anggaran belanja pembangunan infrastruktur jalan tol dan pengadaan barang/jasa serta penguasaan komponen produk dalam negeri oleh PD/UKPD setiap triwulan	Melakukan pengujian atas realisasi penyerapan anggaran belanja pembangunan infrastruktur jalan tol dan pengadaan barang/jasa dan penguasaan komponen produk dalam negeri di PD/UKPD	16	20	20	114.000.000
11	Seluruh PD (Sesuai Kebutuhan)	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP dan BPK-RI	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektori Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi salah satunya selingkungan huruf m : koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan lembaga pemeriksa eksternal terhadap laporan penyelenggaraan sistem pemerintahan dan lembaga pengawasan lainnya.	TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan AAP oleh PD/UKPD	Progres penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPP) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2023 dan tahun sebelumnya (2020-2022). TLHP AAP oleh PD/UKPD tunjua sesuai dengan rekomendasi	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	
12	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, dan Dinas Sumber Daya Air	Monitoring atas Implementasi Penataan RTH dengan integrasi infrastruktur hijau-bru di 15 lokasi				IV	IV		1. Menyusun tau strategi daerah (KSD) No 7 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup, Sub KSD No 14 Mitigasi dan adaptasi bencana iklim, Ruang Lingkup Peningkatan Rasio dan Persebaran RTH dengan integrasi infrastruktur hijau-bru 2. Mendukung sasaran RPDP (KIP) dan Rencana Strategis Ekosistem Kota Dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon dengan Program Pengelolaan Kelembagaan Hayati (Ketani) 3. Mendukung sasaran RPD Terangnya Perlindungan Pola Aktivitas Dan Mobilitas Melalui Pengembangan Berorientasi Ruang Yang Berkelanjutan dengan Program Penyelenggaraan Tata Ruang 4. Temuan BPK dalam pelaksanaan pembangunan RTH	Menilai keberhasilan atas pelaksanaan penataan RTH dengan konsep integrasi hijau-bru	1. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas program penataan RTH dengan integrasi infrastruktur hijau-bru 15 lokasi 2. Melakukan pengujian atas terselenggaranya Pembangunan RTH dengan konsep integrasi hijau-bru	20	0	40	120.000.000

Keterangan:

I	Inspektur Pembantu I
II	Inspektur Pembantu II
III	Inspektur Pembantu III
IV	Inspektur Pembantu IV
V	Inspektur Pembantu V
INV	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
S	Seluruh Inspektur Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi
SKT	Sekretaris

13	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka peningkatan dan penguatnggulan kemiskinan				V	Mempakan salah satu isu strategis dalam Keputusan Gubernur Nomor 292 tahun 2022 tentang Cita Provinsi, KSD 4 Penguatnggulan Kemiskinan, Sub KSD 10 Pempatan Penguatnggulan Kemiskinan, Ruang Lingkup Peningkatan Produktivitas Penduduk Miskin dan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Universal dan Adaptif	1. Menus tingkat keberhasilan dan keasutan (tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat kualitas) antara rencana dengan hasil capaian kegiatan penguatngan dan penguatnggulan kemiskinan 2. Mengidentifikasi permasalahan dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengatas permasalahan tersebut	1. Bantuan Biaya Sosial Pendidikan melalui K/P Plus, KJMU dan BPMS 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui KAJ, K/LJ dan KPDU 3. Pembayaan jaminan kesehatan di luar tuota JKN dan luar program 4. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui keterampilan dan DPAPP 5. Meningkatkan jumlah wilayah terdang- katong kemiskinan melalui intervensi Dindik dan DPAPP	1. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas program penanganan dan penguatnggulan stunting 2. Melakukan pengujian atas terseidgeranya program penanganan dan penguatnggulan stunting	19	0	60	171.000.000
14	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penanganan dan penguatnggulan stunting				V	1. Program Penguatnggulan Kemiskinan (PKK) 5 2. Transakti Layanan Publik 3. Anggaran penanganan stunting pada 31 RSLUD sebesar Rp25.448.366.160,00	1. Pelaksanaan Pemberian Susu dan Mikroan Tambahan untuk Pauder Stunting 2. Pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas program penanganan dan penguatnggulan stunting 2. Melakukan pengujian atas terseidgeranya program penanganan dan penguatnggulan stunting	19	0	30	85.500.000	
15	Seluruh PD dan BUMD	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS)					1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penanganan Pengaduan Yang Ditangani Secara Bakik dan Bona 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 166 Tahun 2017 3. Rendahnya kualitas serta jumlah pelaporan tindak pidana korupsi yang diterima tim WBS	1. Pengelolaan WBS melalui online dan offline 2. Perumusan kebijakan WBS	1. Sosialisasi penanganan WBS di lingkungan Inopokrat 2. Penyusunan MoU Perlindungan Pelapor dengan LPSK 3. Koordinasi dengan PD terkait atas Revisi Peraturan Gubernur Nomor 166/2017 4. Koordinasi Penanganan Peluncuran Peraturan Gubernur Whistle Blowing System dan Peraturan Gubernur Nomor 166/2017 5. Peluncuran Peraturan Gubernur Whistle Blowing System [Revisi] Peraturan Gubernur Nomor 166/2017 6. Sosialisasi WBS kepada PD - Disnakertmas (Bulan Mei) - Dinas PPKUM (bulan Juli) - Dinas KPR (Bulan Agustus) - Dinas KPS (Bulan November) 7. Pembuatan media sosialisasi Revisi Peraturan Gubernur Nomor 166/2017 8. Penyajian Spaduk terkoneksi dengan KPK 9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2017 dan setelah Revisi Peraturan Gubernur tersebut	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	
16	Seluruh PD dan BUMD	Monitoring dan evaluasi Program Pengendalian: Gratifikasi (PG)					1. Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 2. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi 3. Adanya perubahan kebijakan PPG dari KPK RI, sehingga diperlukan penyusunan/pemutihan: perencanaan pada internal	1. Pelaksanaan tugas tim UPG Provinsi DKI Jakarta dan pemenuhan PPG KPK Tahun 2024	1. Pengelolaan laporan penerimaan/pendolakan gratifikasi 2. Penetapan SK Tim UPG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 3. Sosialisasi dan Dieminasi PPG Kepada para stakeholder dan kelembagaan terkait yang rentan terjadi gratifikasi, seperti: - BPPBJ - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Perhubungan - Dinas Kesehatan - Bappeda - Dinas Pendidikan - Dinas PPKUM - Stapol PP	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	

Keterangan:

- Keterangan:
- | | |
|-----|--------------------------|
| I | Inspektorat Pembantu I |
| II | Inspektorat Pembantu II |
| III | Inspektorat Pembantu III |
| IV | Inspektorat Pembantu IV |
| V | Inspektorat Pembantu V |

Y Inspektoral Pembantu
INV Inspektoral Pembantu Bidang Investigasi
WIL Seluruh Inspektoral Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi
SKT Sekretaris

[illegible]

Keterangan:

I	Inspektoral Pembantu I
II	Inspektoral Pembantu II
III	Inspektoral Pembantu III
IV	Inspektoral Pembantu IV
V	Inspektoral Pembantu V
INV	Inspektoral Pembantu Bidang Investigasi
WIL	Seluruh Inspektoral Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi
SKT	Sejahtera

KEGIATAN DUKUNGAN PENGAWASAN

No	Jenis Kegiatan	Mata Pelajaran										Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Inspektoral	Melakukan Pengawasan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 bersama KPK RI										
2	Inspektoral	Melakukan Pelatihan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024										
3	Inspektoral	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta										
4	Inspektoral	Sertifikasi dan Implementasi ISO 37001 : 2016										
5	Inspektoral	Penilaian Mandiri Kapabilitas APF										
6	Inspektoral	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi										
7	Inspektoral	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor										
8	Inspektoral	Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan Jabatan Fungsional PPUPD										
9	Inspektoral	Sertifikasi Profesi Pengawasan										
10	Inspektoral	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pengawasan										

Keterangan:

- I Inspektoral Pembantu I
- II Inspektoral Pembantu II
- III Inspektoral Pembantu III
- IV Inspektoral Pembantu IV
- V Inspektoral Pembantu V
- INV Inspektoral Pembantu Bidang Investigasi
- WIL Seluruh Inspektoral Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi
- SKT Sekretariat

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN 2024

II. INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA JAKARTA PUSAT

AUDIT										20	100	300.000.000
1	1. Suku Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; 2. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; 3. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Audit Kinerja atas Pelaksanaan dan Pengawasan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2023										
			JP	JP	JP	JP						
2	Suku Dinas Lingkungan Hidup	Audit Kepatuhan atas Pengelolaan Persampahan							JP	20	40	120.000.000
REVISI										9	58	78.300.000
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan PD Tertkait	Revisi atas Laporan Keuangan Unaudited Pemprov DKI Jakarta TA 2023	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL								
2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan PD Tertkait	Revisi atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Semester I TA 2024	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL							40	48.000.000
3	Sekurth UKPD	Revisi Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024									40	120.000.000

Keterangan:

I	Inspektorat Pembantu I
II	Inspektorat Pembantu II
III	Inspektorat Pembantu III
IV	Inspektorat Pembantu IV
V	Inspektorat Pembantu V
INV	Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi
JP	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
WIL	Sekurth Inspektorat Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi SKT

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN 2024

III. INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA JAKARTA UTARA

AUDIT										18	100	270.000.000
1	1. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; 2. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; 3. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Audit Kinerja atas Pengembangan UMKM Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2023								Memeriksa tercapainya target kinerja a. Pembinaan dan Pengembangan UMKM; b. Jumlah UMKM naik kelas.		
2	Suku Dinas Lingkungan Hidup	Audit Kepatuhan atas Pengelolaan Persampahan							JU	Pelaksanaan Pengembangan UMKM Tahun Anggaran 2023 pada: 1. Sudin PPKUM: Program Pemberdayaan UMKM 2.Sudin TKTE: Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Sudin Perakerif: Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		108.000.000
REVISI										18	40	
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan PD Perkati	Revisi atas Laporan Keuangan Unaudited Pemprov DKI Jakarta TA 2023	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL						Penilaian, pengumpulan dan pengangkutan sampah di lingkungan Kota Administrasi (2 Kecamatan beserta kearahannya) pada Tahun Anggaran 2023		78.300.000
2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan PD Perkati	Revisi atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Semester I TA 2024	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL						Laporan Keuangan yang disajikan oleh PPKD dan Laporan Keuangan PD/UKPD (sampling)	8	48.000.000
3	Seluruh UKPD	Revisi Pelaksanaan Peningkatan Pengawasan Produk Dalam Negeri Tahun 2024							JU	Laporan Keuangan yang disajikan oleh PPKD dan Laporan Keuangan PD/UKPD (sampling) 1. Meyakini bahwa Perangkat Daerah telah mengklasifikasi minimal 40% anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri; 2. Meyakini realisasi PDN dan TKDN pada Perangkat Daerah telah sesuai dengan komitmen dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Meyakini bahwa perserikatan pedagang PDN (barang wajib dan barang tidak wajib) dipertimbangkan dalam penyusunan RUP, KAK, dan HPS Perangkat Daerah; 4. Meyakini bahwa pengadaan barang wajib PDN tidak dilakukan melalui impor.	18	108.000.000

Keterangan:
I Inspektorat Pembantu I
II Inspektorat Pembantu II
III Inspektorat Pembantu III
IV Inspektorat Pembantu IV
V Inspektorat Pembantu V
INV Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi
JU Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
WIL Seluruh Inspektorat Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi SKT Sekretariat

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN 2024

IV. INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA JAKARTA BARAT

AUDIT										6	100	90.000.000			
1	1. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; 2. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; 3. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Audit Kinerja atas Pengembangan UMKM Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2023						1. Merupakan salah satu isu strategis daerah dalam Regab 292 tahun 2022 tentang Cita Provinsi, yaitu : Kegiatan Strategis Daerah : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub Kegiatan KSD : Pengembangan UMKM Ruang Lingkup Sub KSD : a. Pembinaan dan Pengembangan UMKM; b. Peningkatan jumlah UMKM naik kelas. 2. Merupakan Program Prioritas Daerah dalam RPD 3. Merupakan Bagian dari Perencanaan Pembangunan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Rakorwadanae) 4. Merupakan rencana pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah menuju Jakarta Global City 5. Keterkaitan dengan: a. Sorotan Masyarakat & Isu Nasional Terkini b. Layanan Publik c. Hajat Hidup Orang Banyak	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas pelaksanaan Pengembangan UMKM	Pelaksanaan Pengembangan UMKM Tahun Anggaran 2023 pada: 1. Sudin PPK/UMK: Program Pemberdayaan UMKM 2.Sudin TKTE: Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Sudin Puskraf: Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Menilai tercapainya target kinerja: a. Pembinaan dan Pengembangan UMKM; b. Jumlah UMKM naik kelas.				
2	Suku Dinas Lingkungan Hidup	Audit Kepatuhan atas Pengelolaan Persampahan				JB	JB	JB	JB			6	40	36.000.000	
REVISI													9	58	78.300.000
1	Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PD Terkait	Revisi atas Laporan Keuangan Unaudited Pemprov DKI Jakarta TA 2023	1, II, III, IV, V, WIL	1, II, III, IV, V, WIL				Mandatori sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yaitu Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel dengan indikator kinerja Opini Laporan Keuangan WTP	Memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD TA 2023 telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP	LKPD Provinsi DKI Jakarta dan LK PD/UKPD (sampling) Tahun 2023	Laporan Keuangan yang disajikan oleh PPKD dan Laporan Keuangan PD/UKPD (sampling)				
2	Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PD Terkait	Revisi atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Semester I TA 2024	1, II, III, IV, V, WIL	1, II, III, IV, V, WIL				Mandatori sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yaitu Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel dengan indikator kinerja Opini Laporan Keuangan WTP	Memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD Semester I TA 2024 telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP	LKPD Provinsi DKI Jakarta dan LK PD/UKPD (sampling) Semester I Tahun 2024	Laporan Keuangan yang disajikan oleh PPKD dan Laporan Keuangan PD/UKPD (sampling)		40	48.000.000	
3	Seluruh UKPD	Revisi Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024		JB	JB	JB	JB	Amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PSDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penganggaran, Perencanaan, dan Realisasi Penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah	1. Meyakini bahwa Perangkat Daerah telah mengelolakan minimal 40% anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri; 2. Meyakini realisasi PDN dan TKDN pada Perangkat Daerah telah sesuai dengan komitmen dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Meyakini bahwa persyaratan penggunaan PDN (barang wajib dan preferensi harga) dipertimbangkan dalam penyusunan RUP, KAK, dan HPS Perangkat Daerah; 4. Meyakini bahwa pengadaan barang wajib PDN tidak dilakukan melalui impor.	22	40	132.000.000	

Keterangan:

- I Inspektorat Pembantu I
- II Inspektorat Pembantu II
- III Inspektorat Pembantu III
- IV Inspektorat Pembantu IV
- V Inspektorat Pembantu V
- INV Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi
- JB Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
- WIL Seluruh Inspektorat Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi
- SKT Sekretariat

4	1. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; 2. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi; 3. Suku Dinas Perwiasta dan Ekonomi Kreatif	Revisi atas Penerapan Manajemen Risiko	JB	JB						Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Memberi keyakinan terhadap atas proses penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023 dan pendampingan proses penerapan Manajemen Risiko Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Evaluasi Dokumen Manajemen Risiko UKPD Tahun 2023 2. Pendampingan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko UKPD Tahun 2024 - Konsultasi dan Komunikasi; - Pendapatu kontak; - Penilaian Risiko (identifikasi, analisis dan evaluasi risiko)	Melakukan pengujian atas Penerapan Manajemen Risiko mulai dari Plogam Manajemen Risiko, Pendapan Struktur Manajemen Risiko, Identifikasi Risiko, Evaluasi Risiko, Rencana Penanganan Risiko, Pemantauan Penerapan Risiko, dan Pelaporan Penerapan Manajemen Risiko pada Seluruh PD	11	30	49.500.000
MONITORING DAN EVALUASI																
1	Seluruh PD/UKPD (Sesuai Kebutuhan)	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP dan BPK-RI	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	Lampiran III Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menyenggarakan tugas salah satunya sebagai mana huruf m : koordinasi tidak lanjut hasil pemeriksaan / pengawasan lembaga pemeriksa keuangan negara dan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya	Mempercepat progres penyelesaian TILHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan ATP oleh PD/UKPD	TILHP BPK dan ATP yang belum diindaklanjuti s.d tahun 2023 oleh PD/UKPD mitra kerja litan	Progres penyelesaian TILHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDPT) Tahun 2023 dan tahun sebelumnya (2004 – 2023) dan TILHP ATP oleh PD/UKPD tuntas sesuai dengan rekomendasi				
2	1. Suku Dinas Pendidikan; 2. Suku Dinas Kesehatan; 3. Suku Dinas Sosial; 4. Suku Dinas Pemberdayaan Masyarakat Anak dan Perempuan; Penduduk; 5. Kecamatan beserta Kelurahanya (30% Populasi)	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengawasan dan penanggulangan kemiskinan						JB	Merupakan salah satu isu strategis daerah dalam Pergub 292 tahun 2022 tentang Cita Provinsi, KSD 4 Penanggulangan Kemiskinan, Sub KSD 10 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Ruang Lingkup Peningkatan Produktivitas Penduduk Miskin dan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Universal dan Adaptif	1. Menilai tingkat keberhasilan dan kesesuaian (tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat kualitas) antara rencana dengan hasil capaian kegiatan penanganan dan penanggulangan kemiskinan 2. Mengidentifikasi permasalahan dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengatasi permasalahan tersebut	1. Bantuan Biaya Sosial Pendidikan melalui KJP Plus, KJMU dan BPMS 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui KAJ, KLIJ dan KPDJ 3. Pembiayaan jaminan kesehatan di luar kuota JKN dan luar program 4. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui intervensi dari Sudin PPAPP dan Sudin Sosial 5. Mengurangi jumlah wilayah kantong kemiskinan melalui intervensi Sudin Pendidikan dan Sudin PPAPP	Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta	8	40	48.000.000	
3	Seluruh Kecamatan dan Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat	Monitoring Pencapaian Perkin, Tata Kelola Keuangan, Persediaan dan Aset							1. Pencapaian Perjanjian Kinerja Kepala UKPD lingkup Kecamatan dan Kelurahan belum pernah dilakukan pengawasan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi 4. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Menilai keberhasilan capaian perjanjian kinerja per triwulan, terbit tata kelola administrasi dan pelaporan keuangan serta pencatatan persediaan dan aset	1. Perkin Tahun 2024 lingkup UKPD Kecamatan dan Kelurahan 2. Pengelolaan Keuangan, Persediaan dan Aset UKPD Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024 3. Terbit tata kelola aset meliputi terbit administrasi aset (dokumen; pengadaan belanja modal), pencatatan dan pelaporan aset 4. Terbit tata kelola persediaan meliputi terbit administrasi persediaan (dokumen; pengadaan barang persediaan), pencatatan dan pelaporan persediaan	1. Pencapaian perjanjian kinerja per triwulan 2. Terbit tata kelola administrasi dan pelaporan keuangan meliputi kelengkapan administrasi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan 3. Terbit tata kelola aset meliputi terbit administrasi aset (dokumen; pengadaan belanja modal), pencatatan dan pelaporan aset 4. Terbit tata kelola persediaan meliputi terbit administrasi persediaan (dokumen; pengadaan barang persediaan), pencatatan dan pelaporan persediaan	22	80	264.000.000	
4	Suku Dinas Kesehatan	Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Pembangunan Puskesmas						JB	Merupakan salah satu isu strategis daerah dalam Keppab 292 tahun 2022 tentang Cita Provinsi, yaitu KSD 9 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terintegrasi, Ruang lingkup Penyelenggaraan upaya layanan kesehatan yang menjamin semua orang mempunyai akses layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan mutu yang memadai serta implementasi transformasi pelayanan kesehatan	Tatap perencanaan pada pembangunan Puskesmas Keburehan Glodok dan tahap pelaksanaan kontrak sampai dengan penyerahan barang/jasa (sebelum pembayaran 100%) pada Rehabilitasi Total Puskesmas Kel. Taman Sari dan Duri Kapa	1. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas kegiatan pembangunan Puskesmas. 2. Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang digunakan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah diikuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	10	60	90.000.000		

Keterangan:
I Inspektorat Pembantu I
II Inspektorat Pembantu II
III Inspektorat Pembantu III
IV Inspektorat Pembantu IV
V Inspektorat Pembantu V
INV Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi
JB Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
WIL Seluruh Inspektorat Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi
SKT Sekretariat

2	1. Suku Dinas Pendidikan; 2. Suku Dinas Kesehatan; 3. Suku Dinas Sosial; 4. Suku Dinas Pemberdayaan Perindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; 5. Kecamatan beserta Kelurahannya (30% Populasi).	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan kemiskinan							Merupakan salah satu isu strategis daerah dalam Pegab 292 tahun 2022 tentang Cita Provinsi, KSD 4 Penanggulangan Kemiskinan, Sub KSD 10 Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan, Ruang Lingkup Peningkatan Produktivitas Penduduk Miskin dan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Universal dan Adaptif	1. Menilai tingkat keberhasilan dan kesesuaian (tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat kualitas) antara rencana dengan hasil capaian kegiatan penanganan dan penanggulangan kemiskinan 2. Mengidentifikasi permasalahan dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengatasi permasalahan tersebut	1. Bantuan Biaya Sosial Pendidikan melalui KJP Plus, KJMU dan BPMS 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui KAJ, KJJ dan KPDAJ 3. Pembiayaan jaminan kesehatan di luar kuota JKN dan luar program 4. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui intervensi dari Sudi PPAPP dan Sudi Sosial 5. Mengurangi jumlah wilayah kantong- kantong kemiskinan melalui intervensi Sudin Pendidikan dan Sudi PPAPP	Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta	23	40	138.000.000
3	Seluruh Kecamatan dan Kelurahan Kota Adm. Jakarta Selatan	Monitoring Pencapaian Perkin, Tata Kelola Keuangan, Persediaan dan Aset							1. Pencapaian Perjanjian Kinerja Kepala UKPD lingkup Kecamatan dan Kelurahan belum pernah dilakukan pengawasan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi 4. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Menilai keberhasilan capaian perjanjian kinerja per triwulan, terb tata kelola administrasi dan pelaporan keuangan serta pencatatan persediaan dan aset	1. Perkin Tahun 2024 lingkup UKPD Kecamatan dan Kelurahan 2. Pengelolaan Keuangan, Persediaan dan Aset UKPD Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024	23	80	276.000.000	
KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA															
1	Seluruh PD/UKPD (Seluai Kebutuhan)	Pelaporan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2023 dan Pendampingan dan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun Anggaran 2024	I, II, III, IV, V, WIL						Mandatori sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yaitu Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akutabel dengan indikator kinerja Opini Laporan Keuangan WTP	Menastukan tata cara penutupan buku oleh PD/UKPD dilakukan secara memadai dan mengetahui saldo/sisa dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta persediaan pada akhir Tahun 2024	Saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan pada PD/UKPD terkait	23	25	86.250.000	
2	Seluruh PD	Pelaksanaan verifikasi atas Kematan Penyerapan Laporan Monev Kelapa Konsentur Negara (LHKAN) Tahun 2023 di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta	I, II, III, IV, V, WIL						1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Keayaan Aparatur Negara (LHKAN) 2. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Keayaan Penyelenggara Negara	Menilai kepatuhan PNS dalam menyampaikan e-SPT dan LHKPN Tahun 2023	Pelaporan LHKPN dan e-SPT	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
3	Seluruh PD/UKPD	Pemeriksaan Akhir Jabatan (Penjab)						I, II, III, IV, V, WIL	Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengawasan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah	Menilai batas dan tanggung jawab antara Kepala PD/UKPD lama dengan yang baru	Pemisahan batas dan tanggung jawab antara Kepala PD/UKPD pejabat lama dengan pejabat baru)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	
4	Seluruh PD/UKPD	Pelaksanaan Konsultasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						I, II, III, IV, V, WIL	Keputusan Inspektur Nomor 4 Tahun 2021 tentang SOP Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	

Keterangan:

- I Inspektorat Pembantu I
- II Inspektorat Pembantu II
- III Inspektorat Pembantu III
- IV Inspektorat Pembantu IV
- V Inspektorat Pembantu V
- INV Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi
- JS Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
- WIL Seluruh Inspektorat Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi
- SKT Sekretariat

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN 2024

VI. INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA JAKARTA TIMUR

AUDIT										21	100	315.000.000
1	1. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; 2. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; 3. Suku Dinas Perumahan dan Ekonomi Kreatif.	Audit Kinerja atas Pengembangan UMKM Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2023							1. Merupakan salah satu isu strategis daerah dalam Keppres No. 292 tahun 2022 tentang Cita Provisi, yaitu : Kegiatan Strategis Daerah : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pacea Pandemi Sub Kegiatan KSD : Pengembangan UMKM Ruang Lingkup Sub KSD : a. Pembinaan dan Pengembangan UMKM; b. Peningkatan jumlah UMKM naik kelas. 2. Merupakan Program Prioritas Daerah dalam RPD 3. Merupakan Bagian dari Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Rakorwasdaue) 4. Merupakan rencana pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah menuju Jakarta Global City 5. Keterkaitan dengan: a. Sorotan Masyarakat & Isu Nasional Terkini b. Layanan Publik c. Hajat Hidup Orang Banyak	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas pelaksanaan Pengembangan UMKM	Peleaksanaan Pengembangan UMKM Tahun Anggaran 2023 pada: 1. Sudin PPKUKM: Program Pemberdayaan UMKM 2.Sudin TKTE: Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Sudin Paralel: Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Menilai tercapainya target kinerja: a. Pembinaan dan Pengembangan UMKM; b. Jumlah UMKM naik kelas.
2	Suku Dinas Lingkungan Hidup	Audit Kepatuhan atas Pengelolaan Persampahan						JT	JT	21	40	126.000.000
REVISI												
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan PD Terkait	Revisi atas Laporan Keuangan Unaudited Pemprov DKI Jakarta TA 2023	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL						9	58	78.300.000
2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan PD Terkait	Revisi atas Laporan Keuangan Unaudited DKI Jakarta Semester I TA 2024	I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL						8	40	48.000.000
3	Seluruh UKPD	Revisi Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024		JT						21	40	126.000.000

Keterangan:
I Inspektorat Pembantu I
II Inspektorat Pembantu II
III Inspektorat Pembantu III
IV Inspektorat Pembantu IV
V Inspektorat Pembantu V
INV Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi
JT Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
WIL Seluruh Inspektorat Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi SKT Sekretariat

4	1. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 2. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; 3. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	JT	Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Memberi keyakinan terbatas atas proses penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023 dan pendampingan proses penerapan Manajemen Risiko Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Evaluasi Dokumen Manajemen Risiko UKPD Tahun 2023 2. Pendampingan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko UKPD Tahun 2024 - Konsultasi dan Komunikasi; - Penetapan konteks, - Penilaian Risiko (identifikasi, analisis dan evaluasi risiko)	Melakukan pengujian atas Penerapan Manajemen Risiko mulai dari Pagam Manajemen Risiko, Penetapan Struktur Manajemen Risiko, Identifikasi Risiko, Evaluasi Risiko, Rencana Penanganan Risiko, Pemantauan Penanganan Risiko dan Pelaporan Penerapan Manajemen Risiko pada Seluruh PD	21	30	94.500.000
MONITORING DAN EVALUASI									
1	Seluruh PD/UKPD (Sesuai Kebutuhan)	I, II, III, IV, V, WL	Lampiran III Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektori Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi salah satunya sebagaimana huruf m : koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan /pengawasan lembaga pemeriksa keuangan negara dan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya	Mempercepat progres penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan APJP oleh PD/UKPD	TLHP BPK dan APJP yang belum ditindaklanjuti s.d Tahun 2023 oleh PD/UKPD mitra kerja litab	Progres penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemertasaan Dengan Tjpuas Tertentu (PDIT) Tahun 2023 dan tahun sebelumnya (2004 – 2023) dan TLHP APJP oleh PD/UKPD tuntas sesuai dengan rekomendasi	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	
2	1. Suku Dinas Pendidikan; 2. Suku Dinas Kesehatan; 3. Suku Dinas Sosial; 4. Suku Dinas Pemberdayaan Masyarakat Anak dan Pengendalian Penduduk; 5. Kecamatan beserta Kelurahan/nya (30% Populasi).	JT	Merupakan salah satu isu strategis daerah dalam Regbu 202 tahun 2022 tentang Cita Provinsi, KSD 4, Peningkatan Kualitas Sub KSD 10 Percepatan Peningkatan Kualitas Ruang Lingkup Peningkatan Produktifitas Penduduk Miskin dan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Universal dan Adaptif	1. Memiliki tingkat keberhasilan dan kesesuaian (tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat kualitas) antara rencana dengan hasil capaian kegiatan penanganan dan penanggulangan kemiskinan 2. Mengidentifikasi permasalahan dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengatasi permasalahan tersebut	1. Bantuan Biaya Sosial Pendidikan melalui KJP Plus, KJMU dan BPMS 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui KAJ, KJL dan KPDJ 3. Pembiayaan jaminan kesehatan di luar kuota JKN dan luar program 4. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui intervensi dari Sudin PPAJP dan Sudin Sosial 5. Mengurangi jumlah wilayah kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi Sudin Pendidikan dan Sudin PPAJP	Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta	21	40	126.000.000
3	Seluruh Kecamatan dan Kelurahan Kota Adm. Jakarta Timur	JT	1. Pencapaian Perjanjian Kinerja Kepala UKPD lingkup Kecamatan dan Kelurahan belum pernah dilakukan pengawasan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi 4. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memiliki keberhasilan capaian perjanjian kinerja per triwulan, terbit tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan serta pencatatan persediaan dan aset	1. Pedin Tahun 2024 lingkup UKPD Kecamatan dan Kelurahan 2. Pengelolaan Keuangan, Persediaan dan Aset UKPD Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024	1. Pencapaian perjanjian kinerja per triwulan 2. Terbit tata kelola administrasi dan pelaporan keuangan meliputi kelengkapan administrasi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan 3. Terbit tata kelola aset meliputi terbit administrasi aset (dokumen pengadaan belanja modal), pencatatan dan pelaporan aset 4. Terbit tata kelola persediaan meliputi terbit administrasi persediaan (dokumen pengadaan barang/persediaan), pencatatan dan pelaporan persediaan	21	80	252.000.000
4	Suku Dinas Kesehatan	JT	Merupakan salah satu isu strategis daerah dalam Kepgub 292 tahun 2022 tentang Cita Provinsi, yaitu KSD 9 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terintegrasi, Ruang lingkup Penyelenggaraan upaya layanan kesehatan yang menjamin semua orang mempunyai akses layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan mutu yang memadai serta implementasi transformasi pelayanan kesehatan	1. Memiliki tingkat keberhasilan dan kesesuaian antara rencana dengan hasil capaian kegiatan pelaksanaan hasil capaian kegiatan pelaksanaan dengan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa 2. Mengidentifikasi permasalahan dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengatasi permasalahan tersebut	Persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatangan kontrak, pelaksanaan kontrak sampai dengan penyerahan barang/jasa (sebelum pembayaran 100%) pada Puskesmas Kecamatan Matraman dan Puskesmas Kelurahan Batu Ampar	1. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen risiko atas kegiatan pembangunan Puskesmas. 2. Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah diikuti sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku, mulai tahap Persiapan Pengadaan dan Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi, Pelaksanaan dan Kontrak Jasa Konstruksi sampai dengan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa lainnya s.d. serah terima hasil pekerjaan.	21	40	126.000.000

Keterangan:
I Inspektoriat Pembantu I
II Inspektoriat Pembantu II
III Inspektoriat Pembantu III
IV Inspektoriat Pembantu IV
V Inspektoriat Pembantu V
INV Inspektoriat Bidang Investigasi
JT Inspektoriat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
WL Seluruh Inspektoriat Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi SKT Sekretariat

KEHATAN PENGAWASAN LAURTYA													
1	Seluruh PD/UKPD (Sesuai Kebutuhan)	Pelaporan Pelaksanaan TiTup Buku Tahun 2023 dan Pendampingan dan Pelaksanaan TiTup Buku Tahun Anggaran 2024	I, II, III, IV, V, WIL										
2	Seluruh PD	Pelaksanaan verifikasi atas Kearsafan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2023 di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta											
3	Seluruh PD/UKPD	Pemeriksaan Akhir Jabatan (Pamjab)											
4	Seluruh PD/UKPD	Pelaksanaan Konsultasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											

Keterangan:

- I Inspektorat Pembantu I
- II Inspektorat Pembantu II
- III Inspektorat Pembantu III
- IV Inspektorat Pembantu IV
- V Inspektorat Pembantu V
- INV Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi
- JT Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
- WIL Seluruh Inspektorat Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi
- SKT Sekretariat

NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO KEMAS	2024												Jumlah Personil	Jumlah Hari	Anggaran (Rp)						
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES									
KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA																						
1	Seluruh PD/UKPD (Sesuai Kebutuhan)	Pelaporan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2023 dan Pendampingan dan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun Anggaran 2024												I, II, III, IV, V, WIL	I, II, III, IV, V, WIL	Mandatori sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yaitu Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel dengan indikator kinerja Opini Laporan Keuangan WTP	Memastikan tata cara penutupan buku oleh PD/UKPD dilakukan secara memadai dan mengrahui saldo/sisa dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta persediaan pada akhir Tahun 2024	Saldo/sisa dari realisasi anggaran dan persediaan pada PD/UKPD terkait	Tata cara penutupan buku oleh PD/UKPD telah dilakukan secara memadai	16	25	60.000.000
2	Seluruh PD	Pelaksanaan verifikasi atas Keadaan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2023 di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta												I, II, III, IV, V, WIL		1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Menilai kepatuhan PNS dalam menyampaikan e-SPT dan LHKPN Tahun 2023	Palaporan LHKPN dan e-SPT	Pengujian atas kepatuhan terhadap penyampaian e-SPT dan LHKPN oleh seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tepat waktu	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3	Seluruh PD/UKPD (Pamjab)	Pemeriksaan Akhir Jabatan (Pamjab)													I, II, III, IV, V, WIL	Pertaturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengawasan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah	Menilai batas dan tanggung jawab antara Kepala PD/UKPD lama dengan yang baru	Kepegawaian, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Aset pada PD/UKPD yang mengalami pergantian kepemimpinan	Peninjauan batas dan tanggung jawab antara Kepala PD/UKPD (pjabat lama dengan pejabat baru)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
4	Seluruh PD/UKPD	Pelaksanaan Konsultasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah													I, II, III, IV, V, WIL	Keputusan Inspektur Nomor 4 Tahun 2021 tentang SOP Munk Pelayanan Konsultasi Pengawasan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024	Perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

Keterangan:

- I Inspektorat Pembantu I
- II Inspektorat Pembantu II
- III Inspektorat Pembantu III
- IV Inspektorat Pembantu IV
- V Inspektorat Pembantu V
- INV Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi
- KS Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- WIL Seluruh Inspektorat Pembantu Wilayah Kota dan Kab. Administrasi
- SKT Sekretariat

